



ANDI PABBENTENG

(Analisa Ideologi dan Politik 1946 - 1950)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	20-10-02
Asal Dari	Fak. Sastra
Banyaknya	2 (DJA) exp
Harga	Gratis
No. Inventaris	0210 26130
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan studi di Jurusan Sejarah
pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

oleh

ANDI MAPPANYUKKI

94 07 013

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2000

ANDI PABBENTENG

(Analisa Ideologi dan Politik 1946 - 1950)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan studi di Jurusan Sejarah
pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

oleh

ANDI MAPPANYUKKI

94 07 013

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2000

ANDI PABBENTENG

(Analisa Ideologi dan Politik 1946 - 1950)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan studi di Jurusan Sejarah
pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

oleh

ANDI MAPPANYUKKI

94 07 013

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2000

ABSTRAK

Sejarah masa lampau dapat memberikan suatu sumbangsi pemikiran untuk menata masa sekarang dan masa depan agar tidak mengulangi masa kesalahan-kesalahan dimasa lalu. Dalam tulisan ini, penulis mencoba membahas peranan politik dan ideologi **Andi Pabbenteng**, di Kerajaan Bone pada masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946-1950 dalam menjuhu negara Kesatuan Indonesia.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan suatu konstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan fakta yang diperoleh setelah melalui proses pengujian dan analisis kritis dari rekaman masa lampau. Seleksi sumber, klasifikasi sumber merupakan hal yang sangat penting untuk mendekati obyektifitas sejarah.

Andi Pabbenteng pada revolusi kemerdekaan Indonesia duduk sebagai Raja Bone 1946-1950, Ketua Hadat Tinggi Celebes selatan 1948, Ketua Dewan Utusan Celebes Selatan dalam Komperensi Malino, Pangkal Pinang dan Denpasar, Ketua Badan Penasehat NIT dan Ketua Dewan Raja-raja Celebes Selatan. Peranan **Andi Pabbenteng** sangat besar menentukan posisi Kerajaan Bone dan Celebes Selatan sebagai pusat Negara Indonesia Timur dalam bentuk neraga federasi pada masa itu. Serta dapat melindungi para pejuang republik dari pemerintah Belanda, terutama yang bradah di Kerajaan TellumpoccoE (lebih khusus yang berada di Kerajaan Bone) dari pembantaian **Wosterling** (lebih dikenal dengan korban 40.000 jiwa) di Celebes Selatan. Pada saat itu, bangsawan-bangsawan Bone sangat diperhitungkan dalam kanca perpolitikan untuk menentukan posisi di Celebes Selatan dalam pembentukan Negara Indonesia Timur sampai kembalinya ke Negara Kesatau Republik Indonesia.

Andi Pabbenteng sangat besar sumbangsinya dalam melindungi para pejuang republik dari operasi pasifikasi **Wosterling** di Celebes Selatan. Walaupun **Andi Pabbenteng** bekerja sama dengan pemerintah Belanda (NICA) secara lahiriah, tetapi secara batiniah ia tetap melindungi rakyatnya dari penjajahan Belanda dan pembantaian secara massal.

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Maret 2000 panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul :

ANDI PABBENTENG
(Analisis Ideologi dan Politik 1946-1950)

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra Jurusan Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Maret 2000

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Edward L. Poelinggonang, M.A. | Ketua |
| 2. Margriet Moka Lappia, S.S., M.A. | Sekretaris |
| 3. Drs. Daud Limbugau, S.U. | Penguji I |
| 4. Dra. Yuyun Yundini, M.A. | Penguji II |
| 5. Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum. | Konsultan I |
| 6. Drs. Abd. Latif, M. Hum. | Konsultan II |

The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to a role in the exam committee. The signatures are written over dotted lines. From top to bottom, they correspond to the roles: Ketua, Sekretaris, Penguji I, Penguji II, and Konsultan I. The signature for Konsultan II is not visible as it is cut off at the bottom of the page.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SAstra

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor 1472/PT04.H/W/1994 tertanggal 8 November 1999, dengan ini kami menyatakan dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, ...19... Maret..... 2000

Pembimbing I



Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum

Pembimbing II



Drs. Abd. Latif, M. Hum

Disetujui untuk diteruskan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Dekan
u.b. Ketua Jurusan sejarah
Fakultas Sastra Unhas



Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Maksud dari pada penulisan karya ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Hal ini berkat kesabaran, ketabahan dan ketekunan hati yang tulus, serta tidak mengenal putus asa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan sanak famili, maupun untuk masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan memperoleh gelar pendidikan ini, didukung oleh kamauan yang keras dari penulis dan keluarga, serta bantuan bapak/ibu dosen, khususnya bagi dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa. Namun pada akhirnya dengan segala pengorbanan untuk mewujudkan suatu karya ilmiah, walaupun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Drs. Mustafa Makka, M.S., Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum., selaku ketua Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Abd. Latif, M. Hum., selaku pembimbing.
5. Para dosen penguji.
6. Para dosen sejarah Universitas Hasanuddin.



7. Staf Akademi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
8. Para Informan.
9. Teristimewa, kupersembahkan buat Ayahanda, Ibunda (alm), Kakanda dan adik tercinta yang telah bersusah payah memberikan dorongan dan doa bagi penulis, agar dapat menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarga di masa yang akan datang dan akhirat kelak.
10. Buat Umi, Ibah, Adin, Lela, Lina, Yuli, Fajar, dan semua teman-teman yang telah membantu baik materil maupun dengan doa, agar cepat selesai dari studi, di Universitas.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Amin.

Makassar, 25 Maret 2000


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Alasan Memilih Judul	2
2. Masalah dan Batasan Masalah	4
3. Metodologi	7
BAB II. SULAWESI SELATAN DIMASA ANDI PABBENTENG	
1. Posisi Bone Di Sulawesi Selatan	14
2. Andi Pabbenteng : Sebelum menjadi Raja	18
BAB III. ANDI PABBENTENG SEBAGAI ARUNG PONCENG	
1. Andi Pabbenteng dimasa Pemerintahan Andi Mappanyukki	25
BAB IV. ANDI PABBENTENG DIMASA PEMERINTAHANNYA	
1. Strategi Politik Pemerintahan Kolonial	40
2. Fungsi dan Kedudukan Dewan Hadat Tinggi Selebes Selatan	47

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58
DAFTAR INFORMAN	72



BAB I

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan politik yang semakin memantapkan eksistensi negara Nasional berkembanglah secara pesat sejarah Nasional yang mengisahkan kehidupan negara Nasional itu¹. Namun perlu disadari bahwa untuk membahas sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah daerah diperlukan kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa, agar lebih mengenal dirinya dan untuk memberikan pedoman dalam menentukan langkah pengembangannya.

Oleh karena manusia sebagai obyek pangkal penelitian dan penulisan sejarah, maka yang sangat diperhatikan dalam suatu peristiwa sejarah adalah menyangkut tindakan dan perilaku manusia². Akan tetapi, tidak seluruh kegiatan manusia akan dijadikan cerita sejarah, untuk itulah penulis bermaksud mengangkat sejarah Andi Pabbenteng dari sisi politik dan ideologi. pada masa pemerintahannya 1946-1950 di Kerajaan Bone.

Dengan demikian, suatu peristiwa sejarah yang bersifat kemanusiaan dapat dipilih dan ditentukan inti serta duduk persoalannya sesuai topik yang

¹ Sartono Kartodirdjo, 1985. *"Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah"*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 55.

² Taufik Abdullah, 1985, *"Sejarah Lokal Di Indonesia"*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hal. 9.

dipilih³. Dengan pemahaman tersebut, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya sejarah tidak dapat direkonstruksikan secara utuh. Untuk itulah diperlukan penggunaan konsep dan teori dalam metodologi sejarah dengan tujuan untuk mendekati diri pada keobyektifan pada masa lampau yang dikaji.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji tentang sejarah ANDI PEBBENTENG (analisis ideologi dan politik tahun 1946-1950), dimana pada masa kerajaan hingga Sulawesi Selatan (Kerajaan Bone) menyatakan diri bergabung dengan Negara Republik Indonesia serta peranan Negara Indonesia Timur (NIT). Pada masa itu pula tokoh-tokoh kerajaan Bone ikut berperan dalam menentukan posisi Sulawesi Selatan dalam mendukung Negara Republik Indonesia dan sebagai pusat pergerakan di Sulawesi Selatan dalam menentang kedudukan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kerajaan Bone pada khususnya.

A. Alasan Memilih Judul

Masa lampau, masa kini dan masa depan merupakan tiga dimensi waktu yang tidak dapat dipisahkan karena ketiganya memiliki kausalitas, ketiga dimensi waktu mewarnai seluruh perjalanan sejarah umat manusia sementara itu tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah banyak memberikan sumbangan bagi masa

³ Hugiyo dan P.K. Peorwantara, 1992, "Pengantar Ilmu Sejarah", Jakarta, P.T. Gramedia Cipta, hal. 3.

kini. Dengan demikian sejarah menjadi masa lampau yang hidup dalam ingatan manusia, hidup penuh arti baginya tetapi hanya sedikit yang memiliki realitas yang obyektif kecuali sejauh dapat didukung kebenarannya oleh analisa kritis terhadap kesaksian yang masih dapat ditemukan.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan perkembangan politik yang semakin marak dewasa ini, perlu ditanamkan prinsip-prinsip sejarah maupun melihat masa lampau seseksama mungkin, sebagaimana peristiwa itu terjadi. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sidi Gazalba bahwa :

“Untuk memahami masa kini, kita harus mengikuti masa lalu, karena masa lalu adalah pangkal masa kini dan masa kini adalah ujung masa lalu. Hanya dengan mengertia masa lalu dan memahami masa kni, kita dapat merencanakan masa datang yang merupakan muara masa lalu dan masa kini.”⁵

Adapun maksud dan tujuan penulis adalah untuk melihat sejauhmana peran Andi Pabbenteng dalam membantu pemerintah kolonial Belanda untuk menduduki Sulawesi Selatan dan Kerajaan Bone pada khususnya, yang berperang sebagai pusat kontrol dari kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Sejuah mana pula dukungan NIT untuk mengalihkan pusat pergerakan ke kerajaan Bone serta sikap Andi Pebbenteng sendiri menyikapi gerakan yang

⁴ Louis Gottschalk, 1986. “Mengerti Sejarah”, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hal. 200.

⁵ Sidi Gazalba, 1996, “Pengantar Ilmu Sejarah”, Jakarta, Bharata, hal. X.

menentang dirinya sebagai raja Bone dengan pernyataan Andi Mappanyukki yang menentang pemerintah kolonial Belanda dengan bergabung Negara Republik Indonesia. Apapula dukungan Republik Indonesia terhadap Kerajaan Bone yang ingin bergabung dengan RI untuk melepaskan diri dari belunggu penjajahan Kolonial Belanda pada tahun 1945-1951.

Kesemua yang ada di atas, itu merupakan faktor pendorong bagi penulis untuk mengkaji/menulis biografi politik Andi Pabbenteng pada masa pemerintahannya tahun 1946-1950 dan kedudukannya sebagai Dewan Hadat Tinggi Sulawesi Selatan. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1946-1950 dan kemudian diganti oleh Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone yang XXXIV atau diangkatnya Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone yang kedua kalinya memimpin Kerajaan Bone.

B. Masalah dan Batasan Masalah

Suatu lukisan sejarah mengandung maksud untuk dipahami, sehingga waktu dan peristiwa yang dilukiskan itu, rangkaian anasir yang membangun pengertian yang diharapkan. Apabila kita mencoba menyusuri jejak sejarah Kerajaan Bone tahun 1946-1950, maka hal ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peranan Andi Pabbenteng dalam menduduki tahta Kerajaan Bone. Secara ideologi politik Andi Pabbenteng mempunyai cara tersendiri, untuk melepaskan kerajaan Bone dari penjajahan Belanda.

Ideologi sebagai sesuatu yang mencakup (integral) atas seluruh kehidupan manusia di bumi, termasuk dalam berpolitik (bernegara) ideologi dalam arti sebenarnya yaitu azas pandang yang dipakai untuk dasar pemerintahan. Menurut Alfian, ideologi sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dapat dianggap benar dan adil, mengatur tingkahlaku bersama dalam berbagai segi kehidupan.⁶ Sedangkan politik yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara. Politik pun biasanya berarti semua kegiatan perorangan maupun kelompok yang menyangkut hubungan manusia secara mendasar.⁷ Jadi ideologi dan politik merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Dewan Hadat Tinggi di Sulawesi Selatan, peranan NIT dalam memandang Badan Pemberontak Rakyat Bone terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. NIT dalam hal ini ikut menentukan posisi Kerajaan/Swapraja serta pembentukan susunan Pemerintahan Daerah (khususnya daerah Kerajaan Bone). Setelah dua tahun, Andi Pabbenteng menduduki tahta kerajaan Bone

⁶ Ma'mun Murad Al-Brebesy, 1999, *Menyikap Pemikiran Politik Guekuk dan Amin Rais tentang Negara*. Jakarta, Pajawali Press, hal 51, dikatakan bahwa Alfian lebih banyak dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap ideologi Pancasila. Lihat dalam Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1992, hal. 187.

⁷ *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 1992, hal. 2739.

yaitu pada tanggal 1 November 1948, dia diangkat menjadi ketua Dewan Hadat Tinggi Sulawesi Selatan dan wakil ketuanya adalah Raja Gowa Andi Ijo Karaeng Lalolang Somba ri Gowa⁸. Pada tanggal 12 November 1948 Dewan Hadat Tinggi dilantik oleh Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur Anak Agung.⁹

Beberapa waktu kemudian gerakan gerilya Sulawesi Selatan bermunculan di daerah-daerah, tidak terkecuali daerah kerajaan Bone. Para gerilyawan mengadakan gerakan untuk memberikan reaksi terhadap pemerintah Belanda yang terus berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di Kerajaan Bone yang dalam hal tersebut Belanda dibantu oleh Raja Bone yang berkuasa pada saat itu (Andi Pabbenteng). Namun gerakan-gerakan gerilya terus dilancarkan dan pada tanggal 29 April 1950 ekspedisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menduduki Kerajaan Bone yang berkedudukan di Watampone. Pada tanggal 30 April 1950 pemerintah kerajaan mengirimkan pernyataan kesetiaan pada pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sulawesi Selatan¹⁰. Untuk membatasi uraian kajian ini, maka penulis memfokuskan pada persoalan utama, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang Andi Pabbenteng.

⁸ Andi Muh. Ali, 1986, "*Bone Selayang Pandang*", Watampone, hal. 73.

⁹ Dr. Ide Agung Gde Agung, SH., 1985, "*Dari NET Ke RIS*", Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hal. 478.

¹⁰ Op. Cit, hal. 74.

2. Bagaimana peran Andi Pabbenteng dalam menduduki tahta Kerajaan Bone.
3. Bagaimana upaya tokoh-tokoh lain dalam proses berintegrasi dengan Republik Indonesia dan menentang kedudukan Belanda.
4. Strategi politik pemerintah kolonial dan perubahan sikap pemerintah Kerajaan Bone.

C. Metodologi

Penulisan sejarah atau historiografi adalah suatu konstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan fakta yang diperoleh setelah melalui proses pengujian dan analisa kritis dari rekaman serta peninggalan masa lampau sebagai pelaku sejarah. Seleksi sumber, klasifikasi sumber memerlukan kecakapan dan kemampuan imajinatif yang tinggi. Dalam upaya ini kriteria tersebut sangat penting untuk dimiliki sebagai usaha mendekati obyektivitas penulis¹¹. Sedangkan keberhasilan suatu karya ilmiah ditentukan melalui metode yang digunakan, baik dalam hal pengumpulan data maupun penulisan.¹²

¹¹ Louis Gottschalk, *Op. cit.*, hal. 32

¹² D. A. Wila Huky, 1982, "Pengantar Sociologi", Surabaya, Usaha Nasional, hal. 7.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Heuristik merupakan langkah awal yang ditempuh dalam penelitian sejarah, untuk mencari dan mengumpulkan data yang memuat masalah yang diteliti. Hal ini ditempuh dengan 3 jalan yaitu :
 - Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara membaca literatur-literatur, referensi-referensi serta buku-buku lainnya yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas.
 - Metode wawancara, dalam hal ini diwawancarai adalah orang yang banyak tahu atau bahkan terlibat langsung dalam apa yang diteliti penulis.
 - Studi arsip yaitu dengan cara mencari arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
2. Kriteria, terdiri dari kritik luar dan dalam yaitu untuk menguji dan menilai sumber apakah masih asli atau tiruan (Sekunder atau primer).
3. Interpretasi yaitu suatu kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh dari berbagai sumber baik lisan maupun tulisan yang telah diuji kebenarannya dan keobyektifannya dengan metode kritis.
4. Historiografi yaitu tahapan terakhir dari suatu penyajian sumber dari sumber yang diperoleh baik tertulis maupun lisan dalam bentuk kisah sejarah yang diwajibkan dalam tugas terakhir ini.

Semua kegiatan di atas sangat diperlukan sebagai syarat utama dalam metode sejarah. Kegiatan tersebut merupakan usaha untuk mengumpulkan fragmen-fragmen dari kejadian masa lampau dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada tentang masa lampau dalam suatu penulisan sejarah yang sifatnya deskriptif analisis.

Selain dari itu penulis juga telah membaca beberapa referensi, buku dan arsip yang menyangkut tentang Andi Pabbenteng dan masa aktifnya di kanca politik, tetapi belum ada yang membahas secara khusus peranan politik Andi Pabbenteng pada masa pemerintahannya tahun 1946-1950. Campur tangan Netherland Indische Civil Administratie (NICA) dalam pemerintahan kerajaan Bone pada khususnya dengan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) serta posisi kerajaan Bone di Sulawesi Selatan sebagai penguasa kedua setelah NICA. Sejauh mana pula Andi Pabbenteng menyikapi pergerakan-pergerakan yang berkembang di kerajaan Bone untuk menentang penjajah NICA/mengusir penjajah dari daerah Sulawesi Selatan pada umumnya dan Bone pada khususnya.

BAB II

SULAWESI SELATAN DIMASA ANDI PABBENTENG

Beberapa waktu sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan sekutu yang terdiri dari kesatuan Tentara Inggris, Australia, dan Belanda mendarat di Indonesia untuk melucuti senjata Jepang dan mengembalikan tawanan perang ke negerinya (Jepang). Dalam pasukan sekutu ini, terdapat pula kesatuan pegawai Belanda yang bernama *Nederland Indiche Civiel Administration* (NICA) yang bertugas untuk menguasai kembali Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan serta kerajaan-kerajaan yang mempunyai peranan atau pengaruh yang sangat besar di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Mereka mempunyai alasan untuk mengatur pemerintahan, melepaskan tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang dan juga menjaga keamanan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan klimaks yang tidak disangka-sangka dan diperhitungkan oleh Pihak Belanda. Seperti juga bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tidak disangka akan membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Akibatna NICA yang membonceng pada tentara sekutu tidak siap secara militer

untuk menguasai Indonesia kembali dan tidak siap secara mental untuk menerima perubahan dunia setelah Perang Dunia II.¹³

Pada saat itu Belanda tetap berkuasa dan menanamkan pengaruhnya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa bangsawan dari Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Belanda, seperti bangsawan Bone, Gowa dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone yang menempati posisi paling kuat pada saat itu, memaksa pemerintah Belanda harus melirik kedudukan bangsawan Bone. Ini terbukti setelah Belanda menguasai kembali Kerajaan Bone dari tangan Andi Mappanyukki tahun 1945 yang tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Belanda. Kemudian Andi Mappanyukki terpaksa mengundurkan diri dari tahta Kerajaan Bone. Pada awalnya Pemerintah Belanda tetap meminta Andi Mappanyukki untuk duduk sebagai Raja Bone, akan tetapi Andi Mappanyukki sudah memutuskan tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda dan mengatakan berdiri di beakang republik.

Akhirnya Belanda meminta Andi Pabbenteng untuk bekerja sama dengannya. Namun tawaran tersebut tidak langsung diterima, tetapi terlebih dahulu Andi Pabbenteng berkonsultasi dengan beberapa bangsawan yang pantas menduduki tahta Kerajaan. Seperti Andi Mappanyukki diminta kembali untuk

¹³ H. Baudet dan I. J. Brugmans. 1987. *Politik dan Revolusi Kemerdekaan* (Judul aslinya ; *Balans van Beleid, Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie*, Yayasan Obor Indonesia, hal. xii.

menduduki tahta kerajaan. Kemudian Andi Pabbenteng meminta Arung Ta' untuk menduduki tahta kerajaan Bone yang kosong karena ditinggalkan oleh Andi Mapanyukki. Arung Ta' menolak dengan alasan dirinya sudah tidak pantas lagi untuk menduduki tahta Kerajaan Bone diusianya yang sudah tua. Hampir semua bangsawan Bone menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Andi Pabbenteng yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Polisi Kerajaan Bone dengan Pangkat Kapten Tituler.¹⁴ Memperhatikan hal tersebut, Andi Pabbenteng kemudian berkata kepada Arung Ta' yang berbunyi sebagai berikut :

"Magasisenni nareko pale lya" artinya bagaimana kalau saya.

Menjawablah Arung Ta' :

"Engkako pale masero elo, tudang ri Ade' ri pangkaukenna tana Bone, magi de naiko sisen". Artinya ternyata kau pun mau sekali, duduk sebagai Raja Bone secara adat, kenapa bukan kau saja."¹⁵

Akhirnya Andi Pabbenteng pun menerima tawaran Belanda untuk diangkat menjadi Raja Bone XXXIII pada tahun 1946 dengan persetujuan Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa, sebelum Andi Pabbenteng menjadi Raja Bone Andi Pabbenteng sudah bekerja sama dengan

¹⁴ Drs. Amir Sessu, 1988, Sejarah Perkembangan Kerajaan Bone. Watampone, hal 219 (belum diterbitkan), wawancara Andi Ode Kaimuddin Idris, Andi Muh. Ali dan Andi Mappasissi di Watampone tanggal 24 – 25 Desember 1999, dan Drs. Muh. Ariah dan Drs. Muh. Amir, 1993, Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Profil Nasional dan Patriotik yang konsekuen terhadap Republik Indonesia, Ujungpandang, Depdikbud Sul-Sel, hal. 201.

¹⁵ Wawancara dengan Andi Mappasissi Kepala Museum La Pawawol Bone tanggal 25 Desember 1999 di Watampone.

pemerintah Belanda di bidang keamanan Kerajaan Bone. Setelah menjadi Raja Bone pangkat tersebut dinaikkan menjadi Kolonel Tituler.¹⁶ Setelah dua tahun menduduki tahta Kerajaan Bone Andi Pabbenteng diangkat menjadi Ketua Dewan Hadat Tinggi Selebes Selatan pada tanggal 1 Nopember 1948 yang diwakili oleh Raja Gowa La Ijo Karaeng Laloang.¹⁷

Atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda di Makassar Andi Pabbenteng mengadakan pertemuan dengan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Sultan Buton. Pertemuan itu bertujuan untuk mewakili pemerintah Belanda secara tidak langsung dalam Mukhtar Malino. Mukhtar tersebut berlangsung dari tanggal 15 – 25 Juli 1946 yang menyetujui konsep Negara Federasi yang digagas oleh Dr. H. H. Van Mook.¹⁸ Gagasan Van Mook ini menjadi kenyataan dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur di Denpasar Bali, dengan Presiden Anak Agung Gde Sukawati (bangsawan Bali) pada tanggal 18 Desember 1946.¹⁹ Keputusan tersebut diambil dalam Konferensi Denpasar yang berlangsung tanggal 7 – 24 Desember 1946 dan merupakan lanjutan dari Mukhtar Malino dan Konferensi Pangkalpinang (Bangka tanggal 1 – 12

¹⁶ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, hal. 201, Wawancara dengan Andi Baso Ode (anak dari Andi Pabbenteng) dan Andi Muh. Ali tanggal 24 Desember 1999 di Watampone.

¹⁷ Drs. Amir Sessu. *Op. cit.*, hal. 220

¹⁸ Barbara Silars Harvey. 1989. Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII. Jakarta, Pustaka Utama Gramedia Grafiti, hal. 129.

¹⁹ *Ibid.*

Oktober 1946).²⁰ Ketika Andi Pabbenteng menghadiri komperensi Denpasar pemerintah Hindia Belanda melancarkan operasi militer untuk Selebes Selatan yang dipimpin oleh Westerling. Pasukan Westerling tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember 1946 dan tanggal 11 Desember 1946 keadaan perang dinyatakan di Kabupaten Makassar, Bonthain, Pare-pare dan Mandar.²¹ Setelah Andi Pabbenteng duduk sebagai Raja Bone dan Ketua Hadat Tinggi Selebes Selatan, kaum pergerakan yang anti Belanda semakin memperlihatkan eksistensinya baik di Makassar maupun di Kerajaan Bone bagi mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya wadah pergerakan dan partai pergerakan politik di Sulawesi Selatan, tidak terkecuali di Kerajaan Bone, seperti Masyumi, PMI, Persatuan Peranakan Tionghoa dan lain-lainnya.

1. Posisi Bone Di Sulawesi Selatan

Pada tahun 1900, Kerajaan Bone memiliki peranan yang sangat penting dalam menguasai Sulawesi Selatan. Pecahnya perang 1905 merupakan bukti yang sangat kuat, bahwa Kerajaan Bone memiliki posisi penting dalam menguasai Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone di bawah pemerintahan

²⁰ Ibid., The Liang Gie, 1993, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (jilid I), Yogyakarta, Liberty, hal. 162.

²¹ Barbara S. Harvey., op. cit., hal 134 dan Dr. Anhar Gonggong, Hari Ini, 49 Tahun yang lalu, "40.000" Rakus Indonesia di Sulawesi Selatan dibunuh Westerling tempaknya di dalam Sejarah Indonesia (Seminar Regional Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Sul-Sel 1996), Ujungpandang, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, hal 10.

La Pawawoi Karaeng Sigeri yang merupakan Raja Bone XXXI dan memiliki panglima perang yang sangat tangguh yaitu Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PonggawaE yang merupakan ayah dari Andi Pabbenteng (La Pabbenteng). Setelah runtuhnya Kerajaan Bone mengalami masa transisi pemerintahan dimana tahun 1906 - 1930 Kerajaan Bone diperintah langsung oleh Belanda yang dikoordinir langsung Gubernur Jenderal Selebes yang berkedudukan di Makassar.

Walaupun di bawah pemerintahan Hindia Belanda di Makassar, bangsawan-bangsawan Bone tetap melakukan gerakan gerilya sampai diangkatnya Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone XXXII oleh Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone.²² Namun dalam pelaksanaan harian pemerintahan ditangani oleh Tomarileng, dalam hal ini bangsawan yang bekerja sama dengan Belanda. Tetapi tak sedikit pula bangsawan yang melakukan gerakan-gerakan bawah tanah untuk mengacaukan pemerintahan. Karena situasi politik pemerintah Hindia Belanda terasa pincang yang disebabkan oleh kaum pergerakan di Kerajaan Bone seperti Andi Samballogge Petta Nabba, Andi Amiruddin Kangkong, Andi Mappasessu dan lain-lain. Maka Belanda mulai memikirkan tentang pengisian lowongan raja untuk mengambil hati rakyat Bone. Disampaikanlah hal tersebut kepada Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone guna

²² Wawancara dengan Andi Muhammad Ali tanggal 24 Desember 1999 di Watampone.

mempersiapkan calon terpilih serta dapat disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda.²³ Kendatipun Andi Pabbenteng Arung Macege putra dari Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PenggawaE merasa mempunyai andil untuk menjadi Raja Bone namun pilihan Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone adalah Andi Mappanyukki.

Dari hasil kesepakatan Dewan Ade' Pitu bersama adat lainnya di Kerajaan Bone yang juga disetujui oleh Pemerintah Belanda untuk membentengi pengaruhnya terhadap bangsawan-bangsawan Bone dan Gowa yang menentang pemerintah Belanda.²⁴ Pada tanggal 2 April 1931 dilantiklah Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone XXXII dan keesokan harinya, hari Jum'at didalam khotbah diberi gelar Sultan Ibrahim Ibnu Sultan Husain.²⁵ Pada waktu pelantikan Andi Mappanyukki semua raja-raja di Sulawesi Selatan hadir atas undangan pemerintah Hindia Belanda, termasuk yang mewakili Sultan Buton dan Sangalla Daeng Kende dari Tanah Toraja.

Walaupun pemerintah Hindia Belanda menyetujui Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone, tetapi pemerintah Hindia Belanda sangat berhati-hati menghadapinya. Pada masa pemerintahannya keadaan menjadi tenang, aman dan bebas dari pengacauan, itu karena didukung oleh Andi Pabbenteng sebagai

²³ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, hal 208.

²⁴ *Ibid*, hal 209.

²⁵ *Ibid.*, Drs. Muh. Arfah dan Drs. Muh. Amir, *op. cit.*, hal 107.

Kepala Keamanan Kerajaan Bone. Dikembalikannya kedudukan bangsawan-bangsawan Bone di dalam pemerintahan dan perpolitikan di Kerajaan Bone, itu merupakan suatu bukti bahwa bangsawan Bone mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1928 Gubernur Selebes menyetujui La Maddusila Daeng Parangga sebagai Tomarilaleng yang merangkap sebagai Ketua Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone.²⁶ Sementara bangsawan-bangsawan lainnya disertai tugas mengurus bidang masing-masing ;

1. Arung Macege dibidang Urusan Pemerintahan Umum
2. Arung Pongceng dibidang Urusan Pertahanan dan Keamanan
3. Arung Tibojong dibidang Urusan Kehakiman
4. Arung Tanete ri Awang dibidang Urusan Keuangan dan Ekonomi
5. Arung Tanete ri Attang dibidang Urusan Pembangunan dan Pekerjaan Umum.
6. Arung Ta' dibidang Urusan Pengajaran dan Pendidikan
7. Arung Ujung dibidang Urusan Penerangan dan Kerohanian.²⁷

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda lebih banyak memperhatikan bangsawan Bone, karena pada saat itu kerajaan Bone merupakan daerah yang terakhir ditaklukkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan lebih besar pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Walaupun pada tahun 1924 dilakukan perubahan struktur pemerintahan dengan menjadikan Bone sebagai Zelf Bestuur (Pemerintahan Sendiri) yang dibawah pimpinan Tomarilaleng dan Kerajaan Bone tetap membawahi beberapa distrik. Menurut Andi Muhammad Ali :

²⁶ *ibid.*, hal 100.

²⁷ *ibid.*



"Secara mendasar Kerajaan Bone dijadikan Zelf Bestuur, tetapi struktur pemerintahan Kerajaan tetap dipakai seperti Sulewatang/Kepala Kampung (Kepala Kecamatan sekarang) dan menjalankan pemerintahannya seperti semula (dimasa kerajaan)."

2. Andi Pabbenteng : Sebelum Menjadi Raja

Andi Pabbenteng yang lahir dalam keluarga bangsawan Kerajaan Bone sedikit banyak tertanam konsep kebudayaan Bugis dan aturan adat istiadat kerajaan. Sebagai putra dari Panglima Kerajaan Bone yang gugur dalam perang 1905, secara tidak langsung memiliki jiwa juang seperti yang dimiliki oleh ayahnya (Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PonggawaE).

Pada masa pemerintahan Raja Bone XXXI yaitu La Pawawoi Karaeng Sigeri sangat disegani di Sulawesi Selatan. Pada akhir pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri Kerajaan Bone dilanda perang dengan melawan Belanda yang lebih dikenal dengan nama Rumpana Bone 1905. Dimasa pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri, Andi Pabbenteng Petta Lawa lahir dari seorang ibu dan ayah yang berdarah bangsawan yang bernama Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PonggawaE yang gugur sebagai pahlawan melawan Belanda bersama istrinya We Cenra Datu Cinnong.²⁸ Masa kanak-kanak dari Andi Pabbenteng tidak diketahui secara pasti, sebab pada saat itu Kerajaan Bone dalam keadaan perang melawan tentara Belanda. Menurut

²⁸ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, hal 219. Menurut Andi Ode, Petta PonggawaE tidak gugur dalam peperangan melawan Belanda. Tetapi meninggal karena penyakit yang dideritanya yaitu luka tembak di bagian perut sebelah kirinya, beberapa tahun sesudah perang (kira-kira 2 atau 3 tahun) baru meninggal, Wawancara tanggal 24 November 1999 di Watampone.

Andi Mappasissi Petta Awangpone, yang dianggap sebagai pengganti orang tuanya adalah Arung Ta'. Hal tersebut dapat dilihat sebelum Andi Pabbenteng menduduki tahta kerajaan Bone. Terlebih dahulu meminta kepada Arung Ta' untuk duduk sebagai Raja Bone, yang dia anggap sebagai pengganti orang tuanya yang meninggal dalam perang Bone 1905. Namun hal ini ditolak oleh Arung Ta' dan menyetujui Andi Pabbenteng untuk duduk sebagai Raja Bone.

Beberapa kali Andi Pabbenteng kawin dan diantaranya ialah We Pada Ulang Arung Baranti Putri dari La Pajung Tellu LettaE di Sidenreng bersama We Bunga yang merupakan cucu dari Addatuang Sidenreng dari pihak ibunya serta dari pihak bapaknya.²⁹ Andi Pabbenteng mempunyai 16 orang anak dan dua diantaranya meninggal pada masa kecil.

Andi Pabbenteng mempunyai 7 orang putra dan 7 orang putri dari sembilan istrinya. Adapun nama-nama mereka sebagai berikut :

1. Andi Baso Achmad (alm)
2. Andi Besse Anare
3. Andi Besse Subaedah
4. Andi Baso Arifin Manta (di Belanda sekarang)
5. Andi Baso Idris (Andi Baso Tawakkala)

²⁹ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, Menurut Andi Baso Ode (anak dari Andi Pabbenteng) ayahnya menikah sembilan kali (mempunyai istri sembilan) dan dua istrinya yang tidak mempunyai anak, tapi tak satu pun nama dari istri bapaknya dia (Andi Baso Ode) yang disebut, termasuk ibu kandungnya sendiri dengan alasan tidak tahu nama sebenarnya (kecuali gelarnya) wawancara tanggal 24 November 1999) di Watanpone.

6. Haji Andi Besse Saenab
7. Andi Baso Yunus
8. Andi Besse Pada Uleng
9. Andi Baso Kaimuddin Idris (Andi Baso La Ode)
10. Haji Andi Besse Chenra
11. Haji Andi Baso Toba Idris
12. Haji Andi Bau Pessor (di Jakarta Sekarang)
13. Andi Besse Tenri
14. Haji Andi Besse Ratna.³⁰

Riwayat Andi Pabbenteng lebih banyak diketahui adalah setelah masa pemerintahan Andi Mappanyukki dan masa pemerintahannya sendiri, karena pada saat itu Andi Pabbenteng Petta Lawa sudah berkedudukan sebagai Arung Macege. Pada pemerintahan Andi Mappanyukki, Andi Pabbenteng duduk sebagai anggota Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone dengan menjabat sebagai Kepala Keamanan Kerajaan Bone. Pada tahun 1939 Andi Pabbenteng diasingkan ke Pulau Buton dengan alasan persoalan "siri".³¹ Setelah itu

³⁰ Menurut Andi Baso Ode, No. 1 dan 2 merupakan anak dari istri pertama, 3, 4 dan 5 anak dari istri kedua, 6 anak dari istri ketiga dan mempunyai dua orang anak tapi satu yang meninggal waktu kecil, 7, 8, 9 dan 10 anak dari istri keempat, 11 anak dari istri kelima, 12 dan 13 anak dari istri keenam dan mempunyai 3 orang anak tapi yang satunya meninggal pada masa kecil, 14 anak dari istri ketujuh sedangkan dua istrinya yang terakhir tidak mempunyai anak pun, wawancara tanggal 27 Desember 1999 di Watampone.

³¹ Menurut Andi Meppesasi, Tangan Kanan dari Andi Pabbenteng membunuh salah seorang bangsawan pada saat menjabat kepala keamanan Kerajaan Bone dan dituduh ~~dan~~ ~~pada~~

kedudukan Andi Pabbenteng digantikan oleh Andi Pangerang Daeng Rani putra dari Andi Mappanyukki sendiri yang sebelumnya menjabat sebagai landshap di Gowa. Andi Pangerang Daeng Rani lah yang senantiasa aktif mewakili Raja Bone (ayahandanya) kemana-mana.³²

Setelah peralihan kekuasaan dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan militer Jepang tahun 1942, Andi Pabbenteng pulang dari pengasingan di Pulau Buton dan hanya menjalankan hukumannya selama tiga tahun. Seharusnya Andi Pabbenteng menjalankan hukuman selama delapan tahun sesuai dengan keputusan Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone bersama Raja Bone.³³ Menurut Andi Mappasissi, alasan Andi Pabbenteng pulang dari pengasingan adalah "Segala hukum yang telah berlaku sebelumnya kini telah berakhir dengan bergantinya pemerintahan".³⁴

Masuknya pemerintahan militer Jepang tahun 1942, Kerajaan Bone tetap berstatus sebagai Zelf Bestuur dan Andi Mappanyukki pun tetap berkedudukan sebagai Raja Bone. Setahun setelah berkuasanya Jepang di kerajaan Bone 1943, Pemerintahan Jepang mendapat ronrongan dari rakyat

terlibat didalamnya, wawancara tanggal 25 Desember 1999, di Museum La Pawawoi di Watampone.

³² Drs. Andi Amir Seseu, *op. cit.*, hal 210.

³³ Drs. Andi Arfah dan Drs. Muh. Amir, *op. cit.*, hal 201 dan Andi Baso Ode, Andi Muhammad Ali dan Andi Mappasissi, wawancara tanggal 24 Desember 1999 di Watampone.

³⁴ Andi Mappasissi dan Andi Muhammad Ali, Wawancara tanggal 25 Desember 1999 di Watampone.



Bone yaitu pemberontakan rakyat Unra. Pemerintahan militer Jepang saat itu sangat menekan rakyat Bone dengan mengharuskan menjual semua beras mereka kepada pemerintah Jepang dengan harga yang lebih murah dan rakyat dilarang memakan beras mereka sendiri. Sementara rakyat pun sangat membutuhkan beras sebagai kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu pemerintah militer Jepang kekurangan persediaan logistik untuk menghadapi sekutu Amerika Serikat, Inggris dan Belanda dalam Perang Dunia II.³⁵

Kepulangan Andi Pabbenteng dari pengasingan membuat Andi Mappanyukki terusik, karena Andi Mappanyukki yang diharap untuk membela Andi Pabbenteng dalam persidangan di depan Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone, tapi ternyata Andi Mappanyukki yang memutuskan bahwa Andi Pabbenteng harus diasingkan.³⁶ Akan tetapi, Andi Pabbenteng tetap berdiam diri dan tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap pemerintahan Andi Mappanyukki.

Setelah pemerintahan militer Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal

³⁵ Pada saat pendudukan Jepang di Kerajaan Bone, Jepang memaksa rakyat Bone untuk menjual beras dan jagungnya pada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jepang dan bagi rakyat yang tidak mau menjual beras dan jagungnya akan diambil secara paksa serta rakyat dilarang memakan beras dan jagung yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari mereka, bagi yang didapat akan disiksa oleh tentara Jepang sebagai bukti, tahun 1942 melatus pemberontakan rakyat Unra. Andi Muhammad Ali dan Mappasisi, Wawancara tanggal 25 Desember 1999 di Watampone.

³⁶ Wawancara dengan Andi Mappasisi tanggal 25 Desember 1999 di Watampone.

15 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta atas desakan pemuda Indonesia saat itu. Pasukan sekutu mendarat di Makassar tanggal 21 September 1945 dengan diboncengi oleh pasukan NICA. Dalam bulan September 1945 Raja Bone Andi Mappanyukki mengundang semua anggota Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone dan Arung Lili untuk membicarakan status dan kedudukan Kerajaan Bone.³⁷

Gema Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun sampai di Kerajaan Bone dan pada tanggal 23 Agustus 1945 dibentuk Badan Pemberontak Rakyat Bone (BPRB) untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.³⁸ Pada bulan Oktober 1945 Raja Bone Andi Mappanyukki, bersama dengan Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone dipanggil menghadap oleh Brigadir Jenderal Sekutu di Makassar. Dalam pertemuan tersebut Raja Bone didesak untuk menarik pernyataannya yang menyangkut tentang dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meminta agar memberikan tempat bagi pemerintahan NICA di Kerajaan Bone. Akan tetapi hal ini ditolak oleh Andi Mappanyukki. Desakan-desakan yang terus dilancarkan oleh Pemerintah NICA membuat Andi Mappanyukki terpaksa meninggalkan Kerajaan Bone menuju Jongaya dan pada tanggal 2 April 1946

³⁷ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, hal 214

³⁸ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, hal. 216 dan Soetoto Soedarto, 1986, Sekelompok Sejarah Perjuangan Rakyat Bone Dalam Menyongsong dan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945, Watampone, hal 4 (milik pribadi).

Andi Mappanyukki menitipkan Kerajaan Bone kepada Dewan Ade' Pitu bersama Arung Lili.³⁹ Pada awal berkuasanya kembali Belanda di Kerajaan Bone Andi Pabbenteng diberi jabatan sebagai Kepala Kepolisian dengan pangkat Kapten Tituler dari Pemerintah Hindia Belanda seperti yang disebutkan pada awal pembahasan bab ini.

³⁹ Drs. Amir Sessu, *op. cit.*, hal 217

BAB III

ANDI PABBENTENG SEBAGAI ARUNG MACEGE

1. *Andi Pabbenteng dimasa Pemerintahan Andi Mappanyukki*

Sejak jatuhnya Kerajaan Bone 1905 sampai dengan awal 1931 lembaga Kerajaan Bone kekosongan seorang raja. Pada tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda mengubah status Kerajaan Bone menjadi Zelf Bestuur. Oleh karena itu, Zelf Bestuur Kerajaan Bone di bawah pemerintahan Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone yang diketuai oleh Tomarilaleng dan di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Makassar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada baiknya kita simak pernyataan Barbara S. Harvey, bahwa di wilayah yang berpemerintahan sendiri, penguasa tradisional tampak memperoleh kembali pengaruhnya terhadap rakyat. Akan tetapi mereka tidak mempunyai kekuasaan nyata atau kebebasan lagi dalam menjalankan roda pemerintahan karena di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Dalam suatu hal ada pemisahan antara kewibawaan dan kekuasaan. Kewibawaan tetap berada di tangan penguasa tradisional (lokal/raja) sekalipun kekuasaan itu berada di tangan pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa tradisional tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda di Makassar. Sedangkan para penguasa atau aparat pemerintah

Hindia Belanda kekurangan kewibawaan terhadap rakyat atau penduduk, dan sangat tergantung pada kerja sama dengan para bangsawan atau penguasa setempat (tradisional) untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa.⁴⁰

Pemulihan kembali Kerajaan Bone menjadi Kerajaan dalam bentuk Zelf Bestuur (pemerintahan sendiri) yang dicetuskan oleh pemerintah Hindia Belanda, pada hakekatnya tidak mengembalikan posisinya pada keadaan semula, seperti sebelum Kerajaan Bone ditaklukkan pada tahun 1905. Akan tetapi berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda dan Andi Mappanyukki sebagai Kepala pemerintahan Swapraja (Zelf Bestuur) Bone, hanya diberikan atau memiliki kewenangan dalam mengurus kebutuhan pemerintahan dalam wilayah pemerintahannya dengan persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda di Makasar.

Timbulnya kekacauan di beberapa tempat di Kerajaan Bone yang disebabkan oleh kaum pergerakan (yang menentang Pemerintahan Belanda), maka pemerintah Hindia Belanda mulai memikirkan pengisian lowongan raja di kerajaan Bone. Gerakan gerilya (perlawanan bangsawan secara bergerilya) yang dilancarkan bangsawan-bangsawan Bone membuat kondisi politik pemerintahan Hindia Belanda terus terguncang baik di Kerajaan Bone secara khusus maupun

⁴⁰ Dra. Muhammed Arifah dan Dra. Muhammad Amir, *op. cit.*, hal 108 dan lihat pula Barbara S. Harvey, *op. cit.*, hal 57 - 58.

di Sulawesi Selatan secara umum. Di satu sisi, pihak pemerintah Hindia Belanda membutuhkan mereka dalam mengikat ketaatan dan kepatuhan rakyat. Di sisi lain, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh kembali pengaruh kepada rakyatnya, yaitu mengangkat mereka (salah satu bangsawan) menjadi raja atau pemimpin rakyat/masyarakat dengan sendirinya akan dapat merugikan dan menjadi musuh yang sangat berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda bersedia memulihkan kembali kedudukan Kerajaan Bone secara bertahap dan hal ini disetujui oleh Gubernur Selebes dan daerah Taklukan J. L. Gouverneur dengan memberikan status Swapraja kepada Bone.⁴¹ Tahun 1926 Gubernur Selebes memulihkan kembali Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone bersama Gubernur Selebes memilih La Maddusila Daeng Paraga sebagai Tomarilaleng yang merangkap sebagai Ketua Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone.⁴²

Melihat kondisi politik pemerintahan Hindia Belanda yang semakin tidak menentu akibat reaksi dari kaum pergerakan di Kerajaan Bone. Untuk itu disampaikan kepada Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone guna mempersiapkan calon yang akan dipilih sebagai raja dan dapat disetujui oleh pemerintah Hindia

⁴¹ Abdul Razak Daeng Patunru, 1969, *Sejarah Bone*, Ujungpandang, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hal 287 dan lihat Andi Muhammad Ali, *op. cit.*, hal 69.

⁴² *Ibid. cit.*

Belanda. Sementara Belanda telah mempersiapkan calon dengan pertimbangan faktor keamanan bagi pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, Andi Pabbenteng Petta Lawa Arung Macege putra dari Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PonggawaE merasa mempunyai andil untuk menduduki tahta Kerajaan Bone. Namun keputusan Dewan Ade' Pitu Kerajaan dan adat lainnya jatuh kepada Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone XXXII.

Menurut adat Kerajaan Bone, seseorang tidak boleh atau tidak berhak duduk di atas tahta Kerajaan Bone kalau bukan anak pattola atau bangsawan penuh (anak arung matasa) dan bukan keturunan Tomanurung ri Matajang. Dalam hal ini, sangat menarik untuk dikemukakan apa yang dikatakan oleh Andi Mappanyukki Petta Awampone bahwa, "naiya Bone tenna tola rajeng, tennakurangi cera', teddiakkampaereng ri saliweng", yang berarti "Kerajaan Bone, jabatan raja atau mangkau tidak boleh diperintah oleh rajeng (anak rajeng), dan tidak boleh diperintah oleh cera' (anak cera') serta tidak boleh diambilkan dari luar kalau bukan keturunan Tomanurung ri Matajang. Maksudnya, meskipun calon raja tersebut tinggal di kerajaan lain atau di luar Kerajaan Bone, tetapi dia keturunan dari Tomanurung ri Matajang, tidak termasuk diakkampaereng ri saliweng (diambil dari luar).⁴³

⁴³ Dra Muh. Arfah dan Dra. Muh. Amir, *op.cit.*, hal 101, menurut Andi Mappasisi, anak rajeng adalah anak dari keturunan ibunya yang bukan bangsawan sedangkan anak cera adalah anak bangsawan yang berdarah campuran, wawancara tanggal 25 Desember 1999 di Watampone.

Walau pun Andi Pabbenteng yang merupakan cucu dari Raja Bone XXXI yaitu La Pawawoi Karaeng Sigeri dan putra dari panglima perang Kerajaan Bone (1905) Abdul Hamid Baso Pagilingi. Namun kesepakatan Dewan Ade' Pitu tetap Andi Mappanyukki, yang juga disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan pertimbangan dapat menetralsir kedua kerajaan yang mempunyai pengaruh besar di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa.

Pada tanggal 2 April 1931, dilantiklan Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone XXXII dan keesokan harinya diberikan gelar Sultan Ibrahim Ibnu Husain. Pada pemerintahan Andi Mappanyukki, Andi Pabbenteng sebagai Arung Macege pun duduk dalam Dewan Ade' Pitu dengan menjabat sebagai Kepala Keamanan Kerajaan Bone. Andi Pabbenteng dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Keamanan Kerajaan sangat memperhatikan kondisi, situasi dan keamanan rakyat Bone. Pada saat Andi Pabbenteng sebagai Kepala Keamanan, Kerajaan Bone bebas dari pencurian dan perampokan hewan dan masyarakat merasa tenteram. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Andi Pabbenteng terhadap pelaku pencurian dan perampokan membuat Kerajaan Bone dalam keadaan aman dan tenteram.⁴⁴

Sebagai seorang Raja, Andi Mappanyukki pun termasuk salah satu seorang pemuka agama yang taat terhadap ajaran Islam. Pada tahun 1941,

⁴⁴ Wawancara dengan Andi Muhammad Ali dan Andi Mappasisi tanggal 24 Desember 1999 di Watampone.

Andi Mappanyukki mendirikan sebuah mesjid raya di pusat kota Kerajaan Bone dan sekolah untuk pengembangan ajaran islam pada generasi muda dengan nama "Amier Islam School" di Biru sekarang.⁴⁶

Setelah Perang Dunia I usai dengan kemenangan Jepang, Andi Mappanyukki tetap menduduki tahta Kerajaan Bone. Pada masa itu Andi Pabbenteng pulang dari pengasingan di Pulau Buton. Andi Pabbenteng hanya menjalankan hukuman selama tiga tahun di pengasingan, karena dia mempunyai alasan bahwa, bergantinya pemerintahan maka hukum pun berubah dan tidak berlaku lagi bagi dirinya. Setahun setelah berkuasanya pemerintah militer Jepang (1942) terjadi suatu pemberontakan oleh rakyat Unra akibat tekanan yang dilakukan terhadap penduduk dengan kejam. Andi Abdullah Arung Ponceng sebagai seorang Pengurus Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone bagian Kepolisian yang didampingi oleh Andi Baso Ahmad Anak dari Andi Pabbenteng Petta Lawa berusaha untuk mendekati rakyat Unra yang sedang diamuk amarah.

Usaha Andi Baso Ahmad untuk mendekati rakyat Unra boleh dikata berhasil, karena dia sempat menenangkan rakyat Unra untuk beberapa saat dan mereka (penduduk Unra) menyerahkan senjatanya kepada Andi Baso Ahmad untuk disimpan sebagai tanda kepatuhan rakyat terhadap pemimpinnya. Mereka

⁴⁶ Loc. cit., Drs. Muh. Afah dan Drs. Muh. Amir, op. cit., hal 114, dikatakan mesjid Kerajaan Bone dan Sekolah Amier Islam School didirikan 1908 menurut Abdu' Rizaq Daeng Patutu.

pun tidak akan melakukan perlawanan sepanjang tentara Jepang dan konco-konconya tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap penduduk. Dalam suasana yang belum stabil (masih diliputi rasa amarah), muncullah Sulewatang Jaling bersama anaknya yang langsung menganiaya salah seorang penduduk. Sikap amarah sudah tidak ditahan lagi, akhirnya penduduk kembali merebut senjata yang sudah diserahkan kepada Andi Baso Ahmad. Kemudian menyerang Sulewatang jaling bersama anaknya serta rombongan polisi yang mengakibatkan jatuhnya korban.⁴⁶ Akhirnya masalah tersebut diserahkan dan diselesaikan oleh Raja Bone Andi Mappanyukki.

Setelah Perang Dunia II yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hal ini pun terdengar pula di Kerajaan Bone pada khususnya. Tanggal 23 Agustus 1945 dibentuk Badan Pemberontak Rakyat Bone (BPRB). Pada tanggal 21 Agustus 1945, tentara sekutu yang terdiri dari tentara Australia datang ke Makassar yang dipimpin oleh Brigjen Iwan Dougherty dengan diboncengi oleh tentara NICA dengan tugas pokoknya sebagai berikut :

⁴⁶ Umar Kadir, 1994, Perjuangan Badan Pemberontak Rakyat Bone 1945 - 1947 (Skripsi), Ujungpandang, Fak. Sastra Unhas, hal. 25, dan Dra. Muh. Arifah dan Dra. Muh. Amir, op. cit., hal 147 - 152.

1. Membebaskan secepat mungkin tawanan perang (*Allied Prisoners of War and Interness-APW*),
2. Melucuti tentara Jepang yang telah menyerah itu dan mengirimkan mereka ke Pelabuhan (deportasi) agar secepat mungkin dapat diberangkatkan ke Jepang,
3. Menciptakan ketertiban hukum dan keamanan (*maintenance of law and order*) sehingga dapat diwujudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan militer Inggris kepada pemerintah sipil dari penguasa yang sah berkuasa di wilayah itu.⁴⁷

Pada tanggal 2 April 1946 Andi Mappanyukki, menyerahkan Kerajaan Bone kepada Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bersama Arung Lili. Kemudian Andi Mappanyukki meninggalkan Kerajaan Bone menuju Jongaya dan memilih berdiri di belakang Republik Indonesia serta tidak bekerja sama dengan sekutu. Pada tahun itu juga, Andi Pabbenteng duduk sebagai Raja Bone XXXIII dan berpihak kepada Pemerintah NICA yang berkedudukan di Makassar.

⁴⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal 4 dan Umar Kadir, *op. cit.*, hal 43.

BAB IV

ANDI PABBENTENG DI MASA PEMERINTAHANNYA

Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone yang ke-32, kemudian digantikan oleh Andi Pabbenteng sebagai Raja Bone XXXIII pada tahun 1946. Kedudukannya sebagai raja adalah atas pengangkatan dari Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone dan disetujui oleh pemerintah NICA. Setelah Belanda berkuasa di Kerajaan Bone, pemerintah NICA memberikan pangkat Kapten Tituler kepada Andi Pabbenteng dengan menjabat sebagai Kepala Kepolisian pemerintah Belanda di Kerajaan Bone yang merupakan langkah awal untuk mendekati bangsawan-bangsawan Bone.

Perbedaan ideologi politik antara Andi Pabbenteng dengan Andi Mappanyukki merupakan hal wajar dalam pemerintah. Andi Mappanyukki menyatakan tetap berdiri di belakang Negara Republik Indonesia, hal inilah yang mendorong pemerintah NICA untuk mengangkat kembali keluarga Andi Pabbenteng dan memberikan jabatan/kedudukan dalam pemerintahan supaya dapat bekerja sama dengan Belanda. Andi Pabbenteng yang melihat kekuasaan pemerintah NICA sangat kuat, maka hal itu pun tidak disia-siakannya untuk mengangkat derajat keluarganya sebagai orang pertama di Kerajaan Bone dalam pemerintahan. Perbedaan paham politik antara Andi Mappanyukki dengan Andi Pabbenteng, itu bukan berarti Andi Pabbenteng tidak mau melepaskan diri dari

penjajahan Kolonial Belanda. Menurut Andi Baso Ode, ayahnya (Andi Pabbenteng) pernah berkata kepadanya yaitu "bukan saya tidak mau merdeka, tetapi saya tidak mau melihat pertumpahan darah pada rakyat Bone, masih ada jalan lain untuk lepas dari penjajahan (Belanda)".

1. Sedangkan menurut Andi Muhammad Ali, "Andi Pabbenteng lebih memilih jalan federasi untuk mencapai tujuan kemerdekaan rakyat Bone tanpa kekerasan (pertumpahan darah)".
2. Dari uraian yang ada di atas, Andi Pabbenteng pun menginginkan suatu kemerdekaan dengan cara yang lebih halus tanpa ada korban di salah satu pihak terutama rakyat TellupoccoE lebih khusus rakyat Bone, karena Andi Pabbenteng sangat menyayangi rakyatnya.

Pada awal berkuasanya kembali pemerintah Hindia Belanda 1945 di Selebes Selatan, gerakan pemuda semakin membenahi diri, yang senantiasa melakukan sabotase dan pengacauan terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Kerajaan Bone. Laskar-laskar pergerakan mengadakan hubungan dengan Raja Bone (Andi Mappanyukki), dengan satu kesepakatan membentuk wadah yang dapat mengkoordinir gerakan. Sebagai tindak lanjut dari dukungan Andi Mappanyukki tentang pembentukan badan pergerakan di Kerajaan Bone. Pada tgl 19 Agustus 1945 diadakan rapat di rumah Ismail Sikki yang dihadiri oleh P. S. Pohan, Chalid Husain, Subair Husain, Andi Amiruddin Kangkong, Raden Soedardjo, A. Abu Daeng Pasolong, Rumpang Daeng Parebbo, Andi

Suradi, M. Daeng Paremma, Lamellong, Hasan Turki, Ince Kadir dan lain-lain. Pada tanggal 23 Agustus 1945 diadakan rapat yang kedua kalinya, yang melahirkan suatu wadah perjuangan yang dapat menghimpun semua kelaskaran yang ada di Kerajaan Bone. Ada pun nama badan yang dibentuk yaitu "Badan Pemberotak Rakyat Bone" (RPRB) dan susunan personilnya sebagai berikut :

1. Haji Andi Mappanyukki (Alm), Penasehat
2. Andi Sambaloge Petta Nabba (Alm), Penghubung
3. Haji Andi raung Petta Sanre, Penghubung
4. Andi Padjoppo Petta Ottong, Penghubung
5. P. S. Pohan (Alm), Komandan Kesatuan
6. Andi Amiruddin Kangkong, Komandan Kelaskaran Laba-laba
7. Soetoto Soedardjo, Wakil
8. Ismail Sikki, Komandan Serikat Kala
9. L o m p i, Wakil
10. Chalid Husain, Komandan Keris Terhunas
11. Subair Husain, Wakil
12. Abu Daeng Pasolong, Komandan Tangan Beracun
13. Bajjo Daeng Malewa, Wakil
14. Andi Suradi, Komandan Ex Hoiho Kaigun
15. Rahim, Wakil
16. Raden Soedjono, Komandan Rikugun
17. M. Daeng Paremma, Komandan Serigala Hitam
18. M. Nur, Wakil
19. Andi Mappasere, Komandan Ayam Jantan
20. Haji Andi Pabokori, Wakil
21. Rumpang Daeng Parebbo, Kepala Penerangan
22. Johan B., Wakil
23. Aris Daeng Massiseng, Anggota
24. Andi Bambu Petta Lolo, Komandan Gagak Hitam
25. W. Paseng, Wakil
26. Andi Mappasessu, Komandan GPTP (Gerakan Pemuda TelipoccoE)
27. Mappanyompa, Wakil⁴⁸

⁴⁸ Soetoto Soedardjo, *op. cit.*, hal 4 - 5

Serta bergabung pula polisi landschap (polisi negara) yang jumlahnya satu kompi dan dipimpin langsung oleh Andi Mappanyukki dan Arung Ponceng Andi Mandapi (Kepala Keamanan Kerajaan Bone) yang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi atas nama pemerintahan Republik Indonesia pada bulan Oktober 1945. Pada waktu itu Belanda mengeluarkan larangan untuk berdemonstrasi dan aksi politik lainnya.⁴⁹

Pengangkatan Andi Pabbenteng sebagai Kepala Kepolisian oleh pemerintah Belanda tidak menghambat kaum pergerakan untuk melancarkan aksinya terhadap pihak Belanda. Andi Pabbenteng dalam menjalankan tugasnya, beliau mulai menanamkan kedisiplinan pada dirinya selaku seorang pemimpin dan juga mengembalikan harga dirinya setelah diasingkan pada pemerintahan Andi Mappanyukki. Pada awal menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian yang paling utama dikerjakan adalah menciptakan keamanan dalam Kerajaan Bone terutama dalam hal pencurian dan perampokan ternak. Kedisiplinan dalam memimpin membuat para pengikut Andi Mappanyukki, para pegawai dan aparat kerajaan bergeser secara bertahap mengikuti Andi Pabbenteng. Tindakan yang tegas terhadap semua kejahatan, sampai pada seorang pencuri ayam pun dikenai hukuman setimpal.

Sebelum Andi Pabbenteng menduduki tahta Kerajaan Bone secara resmi pemerintah Belanda sudah menyerahkan kekuasaan kepada Hoofd van Plaatslijk

⁴⁹ Drs. Muh. Arfah, dan Drs. Muh. Amir, *op. cit.*, hal 174

Bestuur (HPB) dari pemerintahan Coontroleur Bone kepada pemerintah Kerajaan Bone tanggal 25 Juli 1946.⁵⁰ Namun pelantikan Andi Pabbenteng sebagai Raja Bone yang dilaksanakan dalam upacara adat penuh di Watampone pada tanggal 3 September 1946.⁵¹ Dalam pelaksanaan tugas baginda sehari-hari dilaksanakan oleh Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone yang diketuai oleh Tomarilaleng bersama dengan Makadange-Tanah.⁵²

Tampaknya Andi Pabbenteng dalam memerintah Kerajaan Bone bersendikan pada dua muka yaitu : secara lahiriah bekerja sama dengan Belanda dan secara batiniah harus membela rakyat dan para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, bidang keamanan tidak lagi dipegang oleh pemerintah Belanda, tetapi langsung di bawah koordinasi Dewan Ade' Pitu dalam hal ini Arung Ponceng Andi Mandapi. Pada saat penyerahan HPB bidang keamanan pun diserahkan oleh pemerintah NICA kepada pemerintah Kerajaan Bone. Seakan-akan Andi Pabbenteng bersikap menutup mata terhadap gerakan pejuang republik, serta membuka peluang perkembangan gerakan mereka.

Seperti yang telah dikatakan di depan, Andi mandapi Arung Ponceng yang pernah memimpin Kepolisian Kerajaan Bone bergabung dengan kaum

⁵⁰ Andi Muhammed Ali, *op. cit.*, hal 73

⁵¹ *Ibid.*, Drs. Amir Sessa, *op. cit.*, hal 220 dan wawancara Andi Baso Ode 26 Desember 1999 di Watampone.

⁵² *Ibid.*, Arsip NIT 1946-1950, Daftar Susunary Pembagian Pekerjaan di Kerajaan Bone dan Bagian Keuangan Kantor Dewan Raja-raja di Denpasar Bali, Juli 1947 - Mei 1949, No. inventaris 44, Arsip Nasional Ujungpandang.

pergerakan (BPRB) di Kerajaan Bone. Pada saat Andi Pabbenteng sebagai Raja Bone, Andi Mandapi tetap duduk sebagai Dewan Ade' Pitu dan bertugas dibidang Keamanan/Kepolisian Kerajaan.

Andi Pabbenteng dalam memimpin Kerajaan Bone, ia mempertaruhkan segala jabatan dan kehormatannya untuk membela rakyat TellupoccoE yang menjadi tanggung jawabnya, ia tidak mau melihat rakyatnya dibantai oleh Westerling, yang melakukan operasi pasifikasi di Selebes Selatan. Kendatipun bekerja sama dengan pemerintah Belanda, tetapi pada dasarnya hanyalah sebatas pada hal kelancaran pemerintahan Kerajaan dan strategi untuk membela rakyat Bone.

Adapun susunan pemerintahan Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Andi Pabbenteng, sebagai berikut :

Soesoenan Pekerjaan Keradjaan Bone

Afschrift.

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| I. | <u>Makkadange-Tanah</u> | <u>OEROESAN OEMOEM. A</u>
1. Controle anggaran
2. Mempelajari atoeran ² yang ada dan mengoesoelkan atoeran ² yang baroe.
3. Oeroesan Agama (pengawasan tas sjaraf)
4. Controle stempat ² (terrein controle)
5. Controle pekerjaan Kepala Wanoea. |
| II. | <u>Tomarilaleng</u> | <u>OEROESAN OEMOEM. B</u>
1. Controle administrasi kepala wanoea
2. Mengatoer perhoeboengan pekerjaan Arue ² Pitu dan Kepala Wanoea
3. Segala oeroesan pegawai (angkatan baroe) |



tambahan gadji dan lain2.

4. Kesehatan ra'jat.
5. Oeroesan oemoem dari keboedajaan.
6. Conduiestaat dari semoea Aroe-Aroe.
7. Controle pasar-pasar.

III. Aroe Matjege

OEROESAN ECONOMIE DAN PERGOEROEAN

1. Mempelajari soember2 kema'moeran dan keadaan-keadaan harga.
2. Memboeat retjengan pekerdjaan boeat berbagai-bagai ejabatan economie.
3. Keadaan perdagangan (pasar2).
4. Keadaan makanan.
5. Memperbaiki organisatie perdagangan dan keradjaan.
6. Memperbaiki organisatie peladjaran.
7. Pekerjaan H. P. B.
8. Sekolah rendah (commissie).

IV. Aroe Teneteriattang

OEROESAN KEOEANGAN

1. Kashouder.
2. Controle kas dari semoea pemegang rekening courant.
3. Pekerdjaan sehari2 dari anggaran.
4. Mengatoer pekerjaan menteri padjak.
5. Controle stempat2 (terrein controle) dari penghasilan dan pengeboearan.

V. Aroe Pontjeng

POLITE DAN OEROESAN PENDJARA

1. Ad. Magistrant.
2. Gerakan2 politie.
3. Pengawasan pendjara.
4. Memberikan soerat sendjata dan soerat keterangan tentang kelakoean baik.

VI. Aroe Taneteriawang

PEKERDJAAN OEMOEM

1. Controle atas pengeloearan2 L. W.
2. Controle atas keadaan2 pekerdjaan2 oemoem.
3. Administratie koelie2 padjak djalan dan daftar pembahagian pekerdjaan dari koelie-koelie ini.
4. Controle atas benda2 jang bergerak dan jang tidak bergerak dari pekerdjaan2 oemoem.
5. Pimpinan pekerdjaan2 Wanoea.

- VII. Aroe Tobodjong KEHAKIMAN/CRIMINEEL
1. Hadat besar crmineel.
 2. Pengawasan hadat ketjil crmineel.
 3. Pemasoekan dan pengeloearan dari preventief dari perkara2 jang soedah dieverwijzen.
- VIII. Aroe Ta' KEHAKIMAN/CIVIEL
1. Hadat besar civiel.
 2. Pengawasan hadat ketjil civiel.

 watampone, 28 Juli 1947
 Aroempone,
 w. g. Andi Pabbenteng.
 Voor eensluidend afschrift,
 De. 1e. KleRI.⁵³

1. Strategi Politik Pemerintah Kolonial

Ada sebuah konsep yang amat penting diwujudkan oleg Dr. H. J. Van Mook, agar pengaruh dan kekuasaannya tetap langgeng; yaitu membentuk negara yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda. Konsep strategi ini merupakan hasil konperensi Linggarjati dan Renville, yaitu mendirikan Negara Federasi. Di tengah-tengah krisis, luapan semangat kemerdekaan dan sikap anti kolonial, Van Mook mencari suatu jalan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada tanggal 21 Desember 1945, ia mengirimkan nota untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Menteri Pemerintah Belanda yaitu :

"Untuk menjamin diwujudkannya otonomi yang sungguh-sungguh bagi wilayah dan bangsa Indonesia untuk perkembangan yang seimbang.

⁵³ Loc. cit., no. inventaris 44

Indonesia harus direkonstruksi dalam federasi yang terdiri dari negara-negara bagian, dengan catatan bahwa susunan pemerintah masing-masing disesuaikan dengan taraf kemajuan masing-masing negara."⁵⁴

Persaingan di kalangan aristokrasi juga digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mendapat kerja sama sejumlah bangsawan terkemuka di Selebes Selatan. Pada tanggal 25 Pebruari 1946, dibentuk Dewan sementara Seleber Selatan (Badan Penasehat Sementara) yang dapat menghimpun raja-raja di Selebes Selatan di bawah koordinasi Raja Bone (Andi Pabbenteng) dan peraturan pelaksanaannya dikeluarkan oleh CONICA di Selebes Selatan pada tanggal 9 Maret 1946.⁵⁵ BPS bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan kabinet Anak Agung. Pada tahun 1947 sidang di depan BPS, dengan mengatakan bahwa kabinet Anak Agung telah mencurahkan perhatiannya terhadap perwujudan hukum baru di Indonesia Timur dengan usaha meneruskan proses pembangunan daerah-daerah otonom yang dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri.⁵⁶

Badan ini dalam perkembangan Selebes Selatan, penentuan undang-undang pajak ekspor (*retributie*) bagi kopra dan menentukan siapa-siapa yang

⁵⁴ Anhar Gonggong, *op. cit.*, hal 8 - 9

⁵⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal 478-479 dan lihat Drs. Harun Kadri ckk, 1984, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950, Ujungpandang, Lembaga Penelitian Unhas, hal 309-310.

⁵⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*

akan ditunjuk mewakili Selebes Selatan dalam konperensi Malino. Dikatakan bahwa peserta yang aktif mewakili Selebes Selatan dan Tenggara adalah :

Andi Pabbenteng Raja Bone
 La Ode Falihi Sultan Buton
 La Tjibu addatuang Sidenreng
 Nadjamuddin Daeng Malewa Handelsconsulent
 Sonda Daeng Mattajang Hoofd djaksa

Penasehat masing-masing :

Mapudji
 Abdul Radjab
 Andi Ronda
 Arung Matjege dan
 Monarfa.⁵⁷

Langkah pertama pemerintah Belanda menyelenggarakan konperensi Malino pada tanggal 15 – 25 Juli 1946. Salah satu hasil dari konperensi Malino ialah resolusi yang berbunyi sebagai berikut :

“De conferentie te Malino spreekt zich eenstemming uit voor de staatkundige herbouw van Nederlandsch-Indie als een geheel Indonesie omvattende federation (de Verenigde Staten van Indonesie), bestaande uit delen (staten) van grote omvang en met zoo groot mogelijke bevoegdheden van zelfregering, binnen welke delen een decentralisatie zal worden georganiseerd of gehanghaafd in autonomie ressorten, in overeenstemming met dewensen der verschillende ethnologisch, cultureel en economisch bijeen behorende voelksroepen, waarbij in het algemenen, zowel voor zelfbestuursgebied als voor niet-zwifbestuursgebied, de zelfbestuursautonomie tot grondslag zal worden genomen voor de autonomie bevoegdheden van deze ressorten.”⁵⁸

(Konperensi di Malino memutuskan dengan *sarata* bulat untuk menyusun kembali tatanegara Hindia Belanda sebagai sebuah federasi

⁵⁷ Drs. Harun Kadir, *op. cit.*, hal 295

⁵⁸ The Liang Gie, *op. cit.*, hal 161 - 162

yang meliputi seluruh Indonesia (Negara Serikat Indonesia), yang terdiri dari bagian-bagian (negara-negara) yang berlingkungan luas yang mempunyai kewenangan-kewenangan pemerintah sendiri yang sebesar-besarnya, yang di dalam bagian-bagian tersebut akan disusun atau dipertahankan suatu desentralisasi dalam 'ressort-ressort' otonom, sesuai dengan hasrat berbagai golongan rakyat yang merupakan kesatuan-kesatuan ditinjau dari segi etnologi, kebudayaan, serta ekonomi; pada umumnya terhadap 'ressort-ressort' ini, baik bagi daerah swapraja maupun bagi daerah bukan swapraja akan dipakai otonomi swapraja sebagai asas bagi kewenangan-kewenangan otonom 'ressort-ressort' tersebut).

Langkah berikutnya pemerintah Belanda mengadakan konferensi Pangkalpinang di Bangka pada tanggal 1 - 12 Oktober 1946 yang menyetujui kesimpulan dalam konferensi Malino tentang pemerintahan Negara Federasi. Pada tanggal 7 - 24 Desember 1946 dilaksanakan konferensi yang ketiga di Denpasar (Bali).⁹⁹

Pada tanggal 7 Desember 1946 telah hadir 70 peserta konferensi Denpasar, 55 orang sebagai utusan mewakili 13 daerah yang disebut pada pasal 14 rencana peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur Besar dan dipilih secara demokratis menurut ketentuan daerah masing-masing. Seperti dikatakan di atas merupakan salah satu keputusan konferensi Malino dan 15 orang utusan yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda mewakili pelbagai golongan kepentingan dan aliran yang terdapat dalam daerah kekuasaan Timur Besar. Ke 13 daerah yang dimaksud adalah ; Selebes Selatan, Sulawesi Tengah,

⁹⁹ Barbara S. Harvey, *op. cit.*, hal 129 dan lihat Harun Kadir, *op. cit.*, hal 316 sedang menurut The Liang Gie Konferensi Denpasar berlangsung dari 2 - 24 Desember 1946.

Sulawesi Utara, Minahasa, Sangir dan Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Timor, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok dan Bali. Rencana semula, sesuai dengan keputusan Lt. Cubemur Jenderal tertanggal 8 Juli 1946, No. 4 tentang pembentukan De Algemene Regieringscomissaris voor Borneo en Grote Oost untuk mengikutsertakan wakil-wakil dari Borneo, tetapi karena beberapa daerah di Borneo waktu itu tidak dapat menyetujui bentuk negara federasi, maka yang hadir hanya peserta dari Timur Besar.⁶⁰ Pada tanggal 24 Desember 1946 dalam konperensi Denpasar di Proklamasikan Negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar.⁶¹

Pada saat konperensi Denpasar berlangsung pemerintah Belanda melancarkan operasi pasifikasi (pengamanan) di Selebes Selatan. Andi Pabbenteng sebagai ketua Badan Penasehat Sementara tidak dapat membendung masuknya pasukan yang dipimpin oleh Letnan Satu Raymond Paul Pierre Westerling dengan kesatuan Komando Depot Special Torpen (DST). Karena pada saat itu, Andi Pabbenteng menghadiri konperensi Denpasar sebagai wakil dari Selebes Selatan. Hal ini merupakan strategi pemerintah Belanda untuk mematahkan perlawanan kaum republik di Selebes Selatan.

⁶⁰ Drs. Harun Kadir. *op. cit.*

⁶¹ A. Muh. Ali, *op. cit.*, hal 37, Barbara S. Harvey, *op. cit.* hal 26, The Liang Gie dan Dr. Edward L. Poelinggomang. *op. cit.* hal 26.

Sulawesi Utara, Minahasa, Sangir dan Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Timor, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok dan Bali. Rencana semula, sesuai dengan keputusan Lt. Cubemur Jenderal tertanggal 8 Juli 1946, No. 4 tentang pembentukan De Algemene Regieringscomissaris voor Borneo en Grote Oost untuk mengikutsertakan wakil-wakil dari Borneo, tetapi karena beberapa daerah di Borneo waktu itu tidak dapat menyetujui bentuk negara federasi, maka yang hadir hanya peserta dari Timur Besar.⁶⁰ Pada tanggal 24 Desember 1946 dalam konperensi Denpasar di Proklamasikan Negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar.⁶¹

Pada saat konperensi Denpasar berlangsung pemerintah Belanda melancarkan operasi pasifikasi (pengamanan) di Selebes Selatan. Andi Pabbenteng sebagai ketua Badan Penasehat Sementara tidak dapat membendung masuknya pasukan yang dipimpin oleh Letnan Satu Raymond Paul Pierre Westerling dengan kesatuan Komando Depot Special Torpen (DST). Karena pada saat itu, Andi Pabbenteng menghadiri konperensi Denpasar sebagai wakil dari Selebes Selatan. Hal ini merupakan strategi pemerintah Belanda untuk mematahkan perlawanan kaum republik di Selebes Selatan.

⁶⁰ Drs. Harun Kadir, *op. cit.*

⁶¹ A. Muh. Ali, *op. cit.*, hal 37, Barbara S. Harvey, *op. cit.* hal 26, The Liang Gie dan Dr. Edward L. Poelinggomang, *op. cit.* hal 26.

Westerling, tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember 1946 dan tanggal 11 Desember 1946 Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal mengeluarkan Surat Keputusan No. 1 yang berisi pernyataan "keadaan perang" (Staat van Oorlog) berlaku untuk afdeling; Makassar, Bonthain, Parepare dan Mandar.⁶² Pemerintah Belanda selanjutnya bersikap hati-hati untuk melibatkan orang-orang Indonesia dalam keputusan untuk melaksanakan operasi pasifikasi dan mereka menggunakan dewan raja-raja untuk mengeluarkan suatu pernyataan yang memohon ditumpasnya ekstrimis (kaum pergerakan) yang mengganggu hukum dan ketertiban. Ketika pernyataan-pernyataan mengenai kekerasan yang merupakan taktik yang digunakan oleh pemerintah Belanda itu dikemukakan dalam konperensi Denpasar, kemudian dikirimlah Sonda Daeng Matajang untuk menyelidiki situasi Celebes Selatan. Dalam laporannya sesudah kembali dari Celebes Selatan; "yang terbunuh hanyalah pengacau dan perampok."⁶³

Setelah konperensi Denpasar, Westerling tetap melakukan operasi pasifikasi di Selebes Selatan. Sementara gerakan kaum republik semakin gencar disuarakan di wilayah TellumpoccoE, terutama di Kerajaan Bone. Seakan-akan Andi Pabbenteng bersikap menutup mata terhadap gerakan, serta membuka peluang berkembangnya gerakan pemuda di Kerajaan Bone.

⁶² Dr. Anhar Gonggong, *op. cit.*, hal 10, Barbara S. Harvey, *op. cit.*, hal 134 dan Dr. Edward L. P., *op. cit.*, hal 29.

⁶³ Barbara S. Harvey, *op. cit.*, hal 134 - 135

Pada saat Westerling melakukan operasi di Parepare, ia menelpon ke Kerajaan Bone untuk melakukan operasi di Kerajaan Bone. Tetapi hal itu, dijawab oleh Andi Pabbenteng dengan mengatakan sebagai berikut :

"Tidak perlu anda masuk ke Bone, sebab kami bisa menyelesaikannya sendiri."⁶⁴

Namun setelah itu Andi Pabbenteng berangkat ke Soppeng untuk menunggu Westerling, tetapi Westerling tidak kunjung datang. Andi Pabbenteng memperfaruhkan segala jabatan dan kehormatannya untuk membela rakyat Kerajaan TellumpoccoE, karena kerajaan tersebut merupakan tanggung jawabnya. Betapa Andi Pabbenteng membela rakyatnya dari pembantaian Westerling, yang tidak menghendaki tindakan kesewenang-wenangan pemerintah Belanda tanpa dilakukan proses hukum. Kendatipun bekerja sama dengan NICA tetapi pada dasarnya hanyalah terbatas pada kelancaran pemerintahan, sedangkan pada hal lainnya, senantiasa membendung tekanan pemerintah NICA terhadap rakyat (TellumpoccoE).⁶⁵ Kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo yang tergabung dalam TellumpoccoE luput dari aksi pembantaian Westerling, karena dibendung oleh Raja Bone Andi Pabbenteng. Menurut Andi Muhammad Ali, ada keuntungan dan kerugian, Andi Pabbenteng bekerjasama dengan Belanda. Secara umum terjadinya pembantaian terhadap

⁶⁴ Andi Baso Ode, wawancara pada tanggal 24 Desember 1999 di Watampone.

⁶⁵ Drs. Amir Sessa, *op. cit.*, hal 219 - 220 dan Andi Muhammad Ali, wawancara tanggal 24 Desember 1999 di Watampone.

kaum pergerakan di Selebes Selatan, karena Belanda tetap berkuasa di Selebes Selatan (khususnya Kerajaan Bone). Keuntungannya, dapat membendung operasi militer Westerling di Kerajaan Bone pada khususnya dan rakyat TelumpoccoE pada umumnya. Secara tidak langsung, Andi Pabbenteng pun memberi kebebasan terhadap kaum pergerakan dan jaminan keamanan bagi mereka yang menelap di Kerajaan Bone (TelumpoccoE).⁶⁶

2. Fungsi dan Kedudukan Dewan Hadat Tinggi Selebes Selatan

Setelah dua tahun menduduki tahta Kerajaan Bone, Andi Pabbenteng ditugaskan mengundang semua raja-raja di Selebes Selatan guna membentuk sebuah lembaga pemerintahan yang mencakup semua daerah di Selebes Selatan. Pada tanggal 1 Nopember 1948 dibentuklah Dewan Hadat Tinggi Selebes Selatan yang diketuai oleh Raja Bone Andi Pabbenteng dan diwakili oleh Raja Gowa La Ijo Karaeng Labang. Sedang Dewan Hadat Tinggi Selebes Selatan berfungsi sebagai Majelis Harian dalam pemerintahan.⁶⁷

Menurut piagam pemerintah daerah Selebes Selatan Dewan Hadat Tinggi harus didampingi oleh suatu Badan Perwakilan Rakyat. Sekalipun peraturan pemilihan untuk badan tersebut sudah selesai, akan tetapi pemilihan belum dapat dilaksanakan. Direncanakan bahwa pemilihan akan berlangsung di

⁶⁶ Andi Muhammad Ali dan Andi Baso Ode, wawancara 26 Desember 1999 di Watampone.

⁶⁷ Idris Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal 478, The Liang Gie, *op.cit.*, hal 136 dan Drs. Amir Sessu, *op.cit.*, hal 220-221.



awal tahun 1949 dan oleh karena itu Badan Penasehat Sementara yang dibentuk pada tanggal 25 Pebruari 1946 masih tetap berkuasa, sampai dapat dibentuk Badan Perwakilan Rakyat Selebes Selatan dengan melalui pemilihan umum.⁶⁶

Sebelum pembentukan kabinet baru, Dewan Hadat Tinggi mengajukan rancangan susunan pemerintahan pada tanggal 29 Desember 1948 :

"4. Stelt voor het ministerie van voorlichting op teheffen en de voorlichting te doen uitgaan van elk ministerie vor zijn eigen taak."⁶⁷

(Mengoesoelkan kementerian penernagan dihapoeskan dan penerangan dilakukan oleh setiap2 kementerian bersangkutan tentang kewajibannya masing-masing).

Kabinet J. E. Tatengkeng (27 Desember 1949 - 14 Maret 1950) mulai menjalankan tugas pada tanggal 27 Desember 1949 adalah suatu kabinet "darurat" atau suatu pemerintahan peralihan. Dalam bulan Desember 1949 pemilihan umum untuk memilih anggota baru Badan Perwakilan Rakyat sudah selesai dan bulan itu juga, mereka diambil sumpahnya, dilantik dan melakukan persidangan pertama.

Berdasarkan dokumen-dokumen tentang pemberhentian permusuhan tanggal 3 Agustus 1949⁶⁸ yang dirumuskan di Jakarta oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia dalam suatu komunike, dinyatakan bahwa

⁶⁶ Ibid, di dalam buku Ide Anak Agung Gde Agung, The Liang Gie dan Amir Sessu tidak ditemukan struktur pemerintahan dan arsip pun tidak dapat kita tersebut.

⁶⁷ Arsip NIT 1946 - 1950, Berkas Adiest Hadat Tinggi Selebes Selatan mengenai Pembentukan Kabinet baru 1947 - 48, no. inventaris 46, Arsip Cabang Ujungpandang.

mereka yang telah dirampas kemerdekaannya oleh karena paham politik atau kedudukannya, atau oleh karena bersenjata dalam organisasi perjuangan disalah satu pihak, akan dimerdekakan kembali secepat mungkin."⁷⁰ Dalam bulan Desember dan Januari banyak pemuda dikeluarkan dari penjara, seperti Andi Djemma, Sultan Daeng Radja, Padjonga Daeng Ngalla dan lain-lain.

Dalam warta politik diberitakan bahwa, Andi Pabbenteng Raja Bone menindas gerilyawan (kaum pergerakan) di Masamba. Namun kenyataannya Raja Bone tidak mampu melawan pemberontak dan kota "Masamba di tangan gerilya". Sementara di Afdeling Luwu terjadi pergolakan politik antara opsir TNI Abdullah Rin dan Hasan dengan pemerintah Kerajaan Luwu, sedangkan rakyat yang tidak mendukung salah satu pihak. Abdullah Rin dan Hasan merupakan bekas anggota Hei-Ho, 17 Agustus 1945 komandan barisan Tank dan wakil commandant pasukan 40.000 Selebes Selatan.⁷¹

Di Afdeling Bone terjadi, pelemparan terhadap rumah-rumah penduduk oleh anggota KNIL dan anak-anak raja pada bulan Maret 1950. Pada bulan April 1950, di Afdeling Bonthain masuk satuan APRIS yang berjumlah 25 orang dan diikuti oleh kurang lebih 200 orang pasukan liar (guerilla). Kemudian menduduki Tangsi Polisi Bonthain dan satuan tersebut meneruskan perjalanannya ke Bulukumba. Namun Andi Pabbenteng, sebagai Ketua Hadat Tinggi Selebes

⁷⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hal 699 - 700

⁷¹ Arsip NIT 1946-1950, Warta Politik, Arsip Cabang Ujungpandang, no. **Inventaris**, 104



Selatan menyelesaikan secara baik, semua persoalan yang masuk tanpa merugikan salah satu pihak.⁷²

Di daerah-daerah Afdeling, telah berdiri partai pergerakan yang melakukan oposisi terhadap pemerintahan yang ada, seperti PNI, PSII, Masyumi, Persatuan Tionghoa Peranakan dan lain-lain. Keputusan rapat pemerintah, militer Belanda mendesak agar PNI dibubarkan dan menjadi partai terlarang.⁷³ Sebagai pengimbang dibentuklah Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dan pengalihan anggota PNI ke PKR tanpa mengganti kartu anggotanya, hal ini pun disetujui oleh Hadat Tinggi Selebes Selatan.⁷⁴

Pihak gerilya bekerja sama dengan pemerintah Kerajaan Bone melalui Arung Ponceng yang bertindak selaku pemegang persenjataan Kepolisian Kerajaan, memberikan secara diam-diam beberapa pucuk senjata kepada gerilyawan. Pada tanggal 30 April 1950 pemerintah Kerajaan Bone di bawah dominasi kekuasaan politik Belanda, mengirim surat pernyataan kepada pemerintah darurat Republik Indonesia Selebes Selatan yang isinya adalah berdiri di belakang republik. Dalam rapat raksasa partai-partai politik dan ormas lainnya

⁷² Arsip NIT 1946 - 1950, Politik Afdeling Bone Agustus - November 1946, No inventaris 119, Arsip Cabang Ujungpandang, Arsip NIT 1946 - 1950, Laporan Ketua Hadat Tinggi Selebes Selatan, no. inventaris 171, Arsip Cabang Ujungpandang, Arsip NIT 1946 - 1950, Laporan mengenai gangguan keamanan di Sigi Bontu dan tempat-tempat lainnya serta kekacauan di Swapraja Bone 30 Desember 1949 - Juni 1950, no. inventaris 170, Arsip Cabang Ujungpandang, Arsip NIT 1946 - 1950, Politik Verslag Daerah Mandat Agustus 1946 - Februari 1949, no. inventaris 120, Arsip Cabang Ujungpandang.

⁷³ Loc. cit.

⁷⁴ Drs. Harun kadr. op. cit., hal. 297.

pada tanggal 14 Mei 1950 di lapangan Merdeka Watampone yang menyatakan "penghapusan pemerintah Kerajaan dan pembentukan Panitia Nasional Timur". Hal tersebut disetujui dan diterima baik oleh pemerintah Kerajaan Bone di bawah Andi Pabbenteng.⁷⁵

Pada tanggal 17 Mei 1950 dibentuklah Panitia Komite Nasional Indonesia Daerah Bone, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kerajaan Bone untuk disahkan pada tanggal 31 Mei 1950. Komposisi dan personil Komite Nasional Indonesia, terdiri dari unsur partai politik, ormas serta golongan minoritas Cina dan Arab. Tanggal 27 Juli 1950, melakukan persidangan yang membahas susunan Dewan Pemerintahan Daerah Bone (DPD) dengan bagian-bagian sebagai berikut :

- I. Urusan umum mencakup; kesehatan, agama dan pengajaran.
- II. Urusan keuangan
- III. Urusan pembangunan dan lalu lintas.
- IV. Urusan penerangan dan pemuda
- V. Urusan sosial ekonomi.⁷⁶

Kemudian Andi Pabbenteng menghadap kepada Gubernur Sulawesi di Makassar dan selanjutnya menghadap Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno di Jakarta. Atas persetujuan pemerintah RI, Andi Pabbenteng mengundurkan diri dari jabatannya dengan hormat. Dalam surat Pemecatan, Andi Pabbenteng mendapat dua kali pemberhentian terhadap dirinya yaitu :

⁷⁵ Drs. Amir Sessa, *op. cit.*, hal 22

⁷⁶ *Ibid.*, hal 223

1999

UP

)

uday

A.

1. Tertanggal 8 Djuni 1950 yang berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1950.
2. Tertanggal 15 Djuni 1950 yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri NIT.⁷⁷

Kemudian Andi Pabbenteng menetap di Surabaya dan pada tahun 1967 kembali ke Watampone, satu tahun kemudian Andi Pabbenteng wafat karena penyakit yang dideritanya (1968). Andi Pabbenteng dimakamkan di Desa Matuju dalam kompleks pemakaman Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PonggawaE.

⁷⁷ Arsip NIT 1946-1960, Pemberhentian Beberapa Raja Di Sulawesi Selatan 1950, Arsip cabang Ujungpandang No. Inventaris 35.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Andi Pabbenteng Petta Lawa Arung Macege, pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki, ia duduk sebagai anggota Dewan Ade' Pitu Kerajaan Bone dengan menjabat sebagai Kepala Keamanan Kerajaan, yang memberi keamanan, ketertiban dan kedamaian bagi rakyat Bone dari pencurian dan perampokan ternak. Pada tahun 1939, Andi Pabbenteng diasingkan ke Pulau Buton dengan suatu peristiwa siri yang terjadi pada dirinya, yang membuat dia harus dihukum selama delapan tahun di pengasingan. Hal tersebut diambil atas persetujuan Dewan Ade' Pitu Kerajaan bersama Raja Bone Andi Mappanyukki.

Pada masa pendudukan Jepang (1942) di Kerajaan Bone, Andi Pabbenteng kembali dari pengasingan yang hanya menjalani hukuman selama 3 tahun. Andi Pabbenteng mempunyai alasan bahwa, dengan bergantinya pemerintah maka hukuman pun sudah tidak berlaku lagi. Kepulangan Andi Pabbenteng dari pengasingan, dia tetap berdiam diri dan tidak membuat reaksi terhadap lawan politiknya atau pemerintahan Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone XXXII.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, oleh tentara sekutu, Maka Belanda kembali berkuasa di Indonesia dan Kerajaan Bone pada

khususnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1945, Andi Pabbenteng diberi pangkat Kapten Tituler oleh pemerintah Hindia Belanda dan menjabat sebagai Kepala Kepolisian. Pada saat Andi Pabbenteng menduduki tahta Kerajaan Bone, ia dinaikkan pangkatnya menjadi Kolonel Tituler.

Kerjasama Andi Pabbenteng dengan pemerintah Hindia Belanda bukan berarti untuk menindas rakyat, tetapi semata-mata untuk melindungi rakyat Bone dari tindak kesewenang-wenangan pemerintah Belanda. Pada awal pemerintahan Andi Pabbenteng, ia mengadakan pertemuan dengan raja-raja di Sulawesi Selatan untuk membentuk Dewan Sementara (badan penasehat harian) yang diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda dan diketuai oleh Raja Bone. Badan ini bertugas untuk menentukan wakil-wakil dari Selebes selatan dalam konperensi Malino, Pangkalpinang dan Denpasar dalam pembentukan negara-negara federasi.

Pada saat dilakukannya Konperensi Denpasar tanggal 7 - 24 Desember 1946, pemerintah Belanda melancarkan operasi pasifikasi (pengamanan) untuk membantai para ekstrimis (kaum pergerakan) di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 11 Desember 1946 pemerintah Belanda mengumumkan keadaan perang bagi daerah Afdeling Makassar, Bonthain, Parepare dan Mandar. Kedudukan Andi Pabbenteng sebagai Raja Bone dan Ketua Badan Penasehat hanya dapat membendung gerakan Westerling untuk memasuki Kerajaan Bone dan Kerajaan kerajaan TellumpoccoE pada umumnya. Andi Pabbenteng sangat membela

rakyatnya dari pembantaian Westerling dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya, yang merupakan daerah tanggung jawab.

Pada tanggal 1 Nopember 1948, Andi Pabbenteng diangkat sebagai Ketua Dewan Hadat Tinggi Selebes Selatan. Tanggal 12 Nopember 1948, dilantik sebagai Ketua Dewan Hadat Tinggi yang berfungsi sebagai Majelis Harian dalam pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT). Dewan Hadat Tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari didampingi oleh Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pada bulan Desember 1949. Pada tahun 1949, menurut laporan politik majelis harian Selebes Selatan, perkembangan politik semakin gencar saat itu. Pada tanggal 3 Agustus 1949, atas usaha Dewan Hadat Tinggi yang diumumkan di Jakarta oleh Pemerintah Belanda bersama Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu komunique bersama, untuk melepas semua tahanan politik secepat mungkin. Pada tahun 1950, Andi Pabbenteng mengundurkan diri sebagai Raja Bone atas persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan dan Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno yang kemudian menetap di Surabaya. Satu tahun setelah peristiwa G/30 S PKI Andi Pabbenteng wafat karena penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di pekuburan Abdul Hamid Baso Pagilingi Petta PonggawaE di Desa Matuju.

ser 1999

t -

.

.

.

..

..

ya, LP

han-

54 -)

..

Kebuday

ilz

IL. BA.

32.-

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Andi Muhammad, Bone Selayang Pandang, Watampone, Damai, 1986.
- Abdullah, Taufik, Sejarah Lokal Indonesia, Yogyakarta, Gadjia Mada University Press, 1985.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara, Jakarta, Rajawali Press, 1999.
- Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, Haji Andi Mappanvukki Sultan Ibrahim Profil Nasional dan Patriotik Sejati yang Konsekuen terhadap RI, Ujungpandang, Depdikbud, 1993.
- Baudet, H dab I. J. Brugmans, Politik dan Revolusi Kemerdekaan, Jakarta, YOI, 1987.
- Daeng Patunru, Abdul Razak, Sejarah Bone, Ujungpandang, YKSS, 1969.
- Ensiklopedi Indonesia, Jakarta, PT. Ichtiar Baru, 1992.
- Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah (terj.), Jakarta, UI Press, 1986.
- Gazalba, Sidi. Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah, Jakarta, Bharata, 1966.
- Gde Agung, Ide Anak Agung. Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, Yogyakarta, Gadjia Mada University Press, 1985.
- Gonggong, Anhar. Hari ini. 49 Tahun yang Lalu. "40.000" Rakyat Indonesia Di Sul-Sel Dibunuh Westerling Tempatnya Dalam Sejarah Indonesia (makalah : Seminar Regional di Sul-Sel 1996), Ujungpandang, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986.
- Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia (Jilid I), Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Hugiono dan P. K. Poerwantara. Pengantar Ilmu Sejarah, Jakarta Rineka Cipta, 1992.
- Huky, D. A. Wila. Pengantar Sosiologi, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.
- Harvey, Barbara Sillars. Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke Di/TII. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989.

ber 1999

t -

.

.

.

..

..

ya, U

han-

954 -)

..

Kebudaj

il

AL, BA.

52.-

- Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kadir, Harun, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Sulawesi Selatan 1945 - 1950, Ujungpandang, Lembaga Penelitian UNHAS, 1984.
- Kadir, Umar, Perjuangan Badan Pemberontak Rakyat Bone 1945 - 1947 (skripsi), Ujungpandang, Fakultas Sastra Unhas, 1994.
- Poelinggomang, Edward L. Strategi Politik Pemerintah Kolonial dan Peristiwa Sulawesi Selatan (makalah : Seminar Regional Sejarah revolusi Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1996), Ujungpandang, Bala Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1996.
- Sessu, Amir, Sejarah Perkembangan Kerajaan Bone, watampone, Koleksi Pribadi, 1998 (belum diterbitkan).
- Arsip NIT 1946 - 1950, Daftar Susunan/Pembagian Kerja Di Kerajaan Bone Dan Bagian Keuangan Kantor Dewan Raja-Raja Di Senpasar Bali Juli 1947 - Mei 1949, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1960, Pemberhentian beberapa Raja Di Sul - Sel 1950, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Berkas Advies Hadat tinggi Selebes Selatan Mengenai Pembentukan Kabinet Baru 1947 - 1949, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Warta Politik, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Laporan-laporan Ketua Hadat Tinggi Selebes Selatan, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Laporan Mengenai Gangguan Keamanan Di Sigeri Barru dan tempat-tempat Lainnya serta Sekacauan di Swapradja Bone 30 Desember 1949 - Juni 1950, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Politik Afdeling Bone Agustus-Nopember 1946, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Politik Verslag Daerah Mandar Agustus 1946 - Pebruari 1949, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.

Des 1999

t -

.

..

..

990, UP

han-

954 -)

...

Kebudaj

12

AL, BA.

52.-

- Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kadir, Harun, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Sulawesi Selatan 1945 - 1950, Ujungpandang, Lembaga Penelitian UNHAS, 1984.
- Kadir, Umar. Perjuangan Badan Pemberontak Rakyat Bone 1945 - 1947 (skripsi), Ujungpandang, Fakultas Sastra Unhas, 1994.
- Poelinggomang, Edward L. Strategi Politik Pemerintah Kolonial dan Peristiwa Sulawesi Selatan (makalah : Seminar Regional Sejarah revolusi Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1996), Ujungpandang, Bala Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1996.
- Sessu, Amir. Sejarah Perkembangan Kerajaan Bone, watampone, Koleksi Pribadi, 1998 (belum diterbitkan).
- Arsip NIT 1946 - 1950, Daftar Susunan/Pembagian Kerja Di Kerajaan Bone Dan Bagian Keuangan Kantor Dewan Raja-Raja Di Senpasar Bali Juli 1947 - Mei 1949, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1960, Pemberhentian beberapa Raja Di Sul - Sel 1950, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Berkas Advies Hadat tinggi Selebes Selatan Mengenai Pembentukan Kabinet Baru 1947 - 1949, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Warta Politik, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Laporan-laporan Ketua Hadat Tinggi Selebes Selatan, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Laporan Mengenai Gangguan Keamanan Di Siceri Baru dan tempat-tempat Lainnya serta Sekacauan di Swapradja Bone 30 Desember 1949 - Juni 1950, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Politik Afdeling Bone Agustus-November 1946, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.
- Arsip NIT 1946 - 1950, Politik Verslag Daerah Mandar Agustus 1946 - Pebruari 1949, Arsip Nasional Cabang Ujungpandang.

Desember 1999

t -

.

..

..

1990, UP

ahan-

954 -)

...

Kebudaj

112

AL, BA.

52.-

Aschritt.I. Makradan s-Pamah.

- DEBESAN DEMOEN A
1. Controle anggaran.
 2. Mempeladjeri atceran2 yang ada dan mengobsoalken atceran2 yang baroe.
 3. Ceroesan Igama (Pengawasan atas Sjarat).
 4. Controle atempat2 (terrein controle) tentang penghasilan dan pengeluaran Landschap.
 5. Controle pekerjaan kepala Wanoa.

II. Poemawilalans.DEBESAN DEMOEN B

1. Controle administratie kepala Wanoa.
2. Mengatoer perhobenboengan pekerjaan area Pitee dan kepala2 Wanoa.
3. Segala ceroesan Pegawai (angktan baroe) tambahan gaji dan lain2.
4. Kesehatan Ma'jat.
5. Ceroesan Gemoen dari Kemoedajaan.
6. Conduictiesnat dari semoes area2.
7. Controle pasar2 (a. espeng).

III. Aroe Metjeqz.DEBESAN ECONOMIC DAN PEKERJAAN

1. Mempeladjeri sumber2 kemamoeran dan keadaan2 harga.
2. Membocat rentjengan pekerjaan boeat berbagai2 jabatan economic.
3. Keadaan perdagangan (pasar).
4. Keadaan makapan.
5. Sempertbaiki organisatie perdagangan dan keradjiaan.
6. Sempertbaiki organisatie peladjaran.
7. Pekerjaan H.P.H.
8. Sekolah rendah (Commissie).

IV. Aroe Teneteristans.DEBESAN KEDEWANGAN.

1. Kasnoeder.
2. Controle kas dari stacee pemegang rekening courant.
3. Pekerjaan beharin dari anggaran.
4. Mengatoer pekerjaan Menteri Pajak.
5. Controle atempat2 (terrein controle) dari penghasilan dan pengeluaran.

V. Aroe Pontjeng.POLITIE DAN DEBESAN PEMDITARA.

1. Au. Registrant.
2. Ser. Kom. Politie.
3. Pengawasan Penjara.
4. Memberiken surat kendjata dan surat keterangan tentang kelakuan b. i. k.

VI. Aroe Taneteriawang.

PEKERDJAAN ORMOEM.

1. Controle atas pengeloesaran² L.W.
2. Controle atas keadaan² pekerdjaan² Ormoem.
3. Administratie koslie² padjak djalan dan daftar pembahagian pekerdjaan dari koslie² ini.
4. Controle atas benda² jang bergerak dan jang tidak bergerak dari pekerdjaan² Ormoem.
5. Pimpinan pekerdjaan² Wanoea.

VII. Aroe Tibedjong.

KEMANTHA / CRIMEVEL.

1. Hadat Besar Crimineel.
2. Pengawasan Hadat Ketjil Crimineel.
3. Pemaseokkan dan pengeloesaran dari preventief dari perkara² jang soedah dioverwijzen.

VIII. Aroe Ta.

KEMANTHAN / CIVIEL.

1. Hadat Besar Civil.
2. Pengawasan Hadat Ketjil Civil.

Wataspons, 28 Juli 1947

Aroempons,

w.g. Andi Pabentong .

voor eensluidend afschrift,

De le.klerk,

30
12

Lampiran No. 2

Gehoord het verzoek van Z.E. den President van Indonesia Timoor om advies te maken de vorming van een nieuw kabinet, heeft aanleiding het volgende te kennen:

1. stelt voor de tegenwoordige Minister President Z.E. Ida Anak Agoeng Gede Agoeng aan te zoeken voor het vormen van een nieuw kabinet.

2. stelt voor de huidige ministers te handhaven voor de thans door hen beheerde portefeuilles behoudens de nader te noemen uitzonderingen.

3. stelt voor de huidige minister van onderwijs te vervangen door den Heer Abdoel Aziz daeng Nampo, thans hoofd van de onderwijsdienst Zuid-Celebes, en de huidige minister van sociale zaken, Mr. S.S. Pelengkahu, te vervangen door den Heer R. Claproth, thans vice-Minister van Justitie.

4. stelt voor het Ministerie van Voorlichting op te heffen en de Voorlichting te doen uitgaan van elk Ministerie voor zijn eigen taak.

5. stelt voor het ambt van Vice-Minister af te schaffen; indien echter voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Vice-Minister wordt nodig geacht, in verband met het feit dat de Minister van Binnenlandse Zaken tevens Minister-President is, wordt er op aangedrongen, dat als Vice-Minister Binnenlandse Zaken iemand van Zuid-Celebes wordt aangezocht, en wel den Heer Harzooki daeng Maralla, H.R.B. Sindjai.

6. stelt voor het ambt van Minister van Staat (Minister Kehormatan) in te stellen, teneinde de Zelfbestuurders een vertegenwoordiger te geven

Mendengar permintaan dari P.J.M. Presiden dari Indonesia Timoor oentoek meaberikan advies tentang pembentoeakan dari satoe kabinet baroe, menjaspaiakan dengan hormat seperti berikoat:

1. mengoesoelkan soepaja Perdana Menteri jang sekarang P.J.M. Anak Agoeng Gde Agoeng dieundang oentoek meabentoeak satoe kabinet baroe.

2. mengoesoelkan meapertahankan menteri2 jang sekarang dalam kementeriannja masing2 jang dipegangnja sekarang ketjoeali jang terseboet dibawah ini.

3. mengoesoalkan Menteri Pengadjaran, jang sekarang, P. Toean E. Katoppo diganti oleh Toean Abdoel Aziz daeng Nampo, sekarang mendjadi Kepala Dinas Pengadjaran Selebes Selatan dan Menteri Sociale Zaken jang sekarang Mr. S.S. Pelengkahu diganti oleh Toean R. Claproth, sekarang Menteri Moeda Justitie.

4. mengoesoelkan kementerian Penerangan dihapoeskan dan Penerangan dilakoekan oleh tiap2 Kementerian bersangkootan tentang kowadjabannja masing-masing.

5. mengoesoelkan pangkat Menteri2 Moeda dihapoeskan; Apabila oentoek Kementerian Dalam Negeri diperloekan satoe Menteri Moeda, berloesboeng karena Menteri Dalam Negeri djoega merangka Perdana Menteri, maka diminta dengan sangat soepaja salakoe Menteri Moeda ditjari seorang dari Selebes Selatan (soekoe Boegis-Makassar), jaitoe Pa. doeka Toean Harzooki daeng Maralla Kepala Pemerintah di Sindjai.

6. mengoesoelkan pangkat Minister van Staat (Minister Kehormatan) diadukan soepaja Zelfbestuurder2 diberikan satoe wakil dalam Kementerian dan

1999

P

day

in het Ministerie, en dan tevens aan te werken voor dit ams.

70. verklaart, dat sommigen onder de Parlementsleden die als afgevaardigden van de Radja's zijn verkozen voor de Conferentie te Den Passar, niet altijd de mening der Radja's in Zuid-Celebes hebben weergegeven.

Stelt vast, dat indien deze Parlementsleden een mening verkondigen welke niet in overeenstemming is met de duidelijke wens der Zelfbestuurders zij slechts voor zich zelve spreken, en niet meer de mening vertolken van hen die hen hebben afgevaardigd.

Heeft derhalve besloten deze Parlementsleden er schriftelijk onder het oog te brengen, dat zij verplicht zijn bij het uitbrengen van hun stem over gewichtige aangelegenheden te voren overleg te plagen met de Hadat Tinggi.

80. verklaart het vanzelfsprekend te achten, dat de nieuwe Regering van Oost-Indonesië zal meewerken aan de speedige tot standkoming van de Negara Indonesia Serikat, en dus zal deelnemen aan de Interim Regering.

soesaja diminta pada pertemuan tersebut untuk kontak tingkat ini.

7. menerangkan, bahwa beberapa dari anggota Parlemen yang dipilih dalam pertemuan radja2 Soeloes Selatan ke Konferentie Den Passar, pada waktu yang akhir ini tidak senantiasa mengemukakan pendirian radja2 Soeloes Selatan.

Menetapkan, bahwa apabila anggota Parlemen ini mengemukakan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan yang nyata dari Zelfbestuurder2, maka mereka itoe berbitjara atas kemauannya sendiri, dan tidak lagi menterdjanahkan pendapat dari mereka yang mengutusannya.

Oleh sebab itoe kami menetapkan hal-peringati dengan soerat pada anggota2 Parlemen itoe, adalah berkewajiban bahwa dalam hal mengemukakan soeran, tentang oeresan2 yang penting terlebih dahulu bereslah dengan Hadat Tinggi.

8. menerangkan, bahwa dengan sendirinya menganggap bahwa Pemerintah baroe di Indonesia Timoor akan teoret bekerja dja oentoek terlaksananya dengan segera Negara Indonesia Serikat, djadi dimana berarti akan ambil bahagian pada Interim Regering.

Malassar, 29 December 1948.

1999

dag

MK DAERAH SELEBES SELATAN
WARTA*POLITIK

Ajara : Warta - politik untuk
Bulan November 1949

Rahasia

: 1999

II. Gerakan Pemberontakan
dan Politik

Selain dari beberapa hal ichwal jang ta' penting maka ketenteraman umum tidak diganggu. Meskipun begitu pergerakan2 di bawah tanah tetap ada, dugaan mana diperkuatkan oleh hasil pemeriksaan dalam peristiwa di Masamba. Dalam perhubungan2 dan perhatian2 antara anasir2 yang tidak bertanggung jawab itu seringkali disebut "Pasukan 40.000."

Tindakan2 pemerintah yang kuat, yang diambil terhadap pemerintah2 di Masamba mendjadi alasan untuk Harian "Kedaulatan Ra'jat", yang terbit di Djokja untuk menjebut S. P. Arumpone dalam suatu karangan di bawah kepala: "Andi Pabbenteng Radja Bone menindas Geri'ja."

Di dalam karangan itu diberikan suatu pemandangan tentang peristiwa di Masamba jang djauh dari kebenaran, antara lain disebut bahwa "Radja Bone" (!) tidak sanggup melawan pemberontak2 dan kota "Masamba di tangan gerilya."

Sajang sekali buat harian itu, bahwa keadaan yang sebenarnja adalah lain sekali seperti dijelaskan sebentar di bawah bahagian Luwu.

Afdeling Luwu :

Dikatakan bahwa pemerintah kurang mendapat pengaruh di masyarakat karena ra'jat tidak mau diseret untuk kedua kalinya dalam pertentangan kelompok antara pemerintah kerajaan dengan kelompok pemberontak. Namun dengan cepat pemerintah menangkap kepala pemberontak: dua opsir TNI Abdullah Rin dan Hasan. Abdullah Rin tiba di Makassar beberapa bulan jang lalu, ia menanda tangani sebagai "Cammandant Pasukan T.N.I 40.000 Sulawesi Selatan, tinggal 13 tahun di Djawa, anggota Hei-Ho dan 17 Agustus 1945, Komandan Barisan Tank" sedangkan Hasan manandatangani sebagai "Wakil Commandant Pasukan 40.000 Sulawesi Selatan."

KEMERSI NEGARA
MAKASSAR
15 Maret 1950.-
Badang Resersir kl. II.
Laporan tentang keadaan2 jang
ada terdjadi di Bone.

Lampiran No. 4

LAPURAN.

Dapat disampaikan pada P.Tuan sebagai berikut; pada hari ini saja mendengar kabar dari orang Bone, orang itu suku bugis dia ada menerangkan de sedjelas-djelasnja keadaan2 jang menakutkan penduduk kampung tersebut serta mengemukakan pada waktu malam. Jang selalu kedjadian dikampung ini, jaitu: pelemparan batu terhadap rumah2 penduduk kampung tersebut. Sipendjabat mana dapat diketahui bahwa siapakah jang memlikin (melakukan) hal tsb. Maka pada su tu malam penduduk kampung tsb. jang ta menghendaki hal itu, bermufakatlah unt mengintip dan mengamati-amatinja sipendjabat kebetulan pada saat itu terdja lagi pelemparan batu terhadap ruma-h2 orang-kampung tsb. tesdjadinja hal itu sala-satu dari permufakatan itu menjusul kedatangannja batu jang dilemparka itu; kedapatan olehnja, bahwa ta lain ta bukan melakukan hal tsb., melainkan tentara K.N.I.L. dan anak2 radja2 jang jinamakan andi-andi. Penduduk kampung jang ta menghendaki hal tsb. mengundurkan diri sebab mereka takut dari orang jang melakukan hal tsb..-

Keesokan harinja, sala-satu penduduk kampung tsb. melaporkan kepada jang berhadjib untuk mentjega perbuatan jang mungkin membahayakan ra'jat dikampi itu. Kalau jang berwadjib takut mentjega hal tsb., maka penduduk kampung tsb. terlebih-lebih takutnja. Kiranja hal ini dibiarkan, maka terpaksalah mereka menanggung dan mempertahankan nasibnja pada masa jang selalu dihalaminja itu.

Djika hal mana jang bertentang dengan penduduk kampung tsb. dibiarkan berdjalan langsung serta ta mendapat teguran dari sipadjikan, mungkin akan terdjadi huru-hara dinegeri itu; akibatnja mendjadi pengorbanan oleh karem perbuatan2 jang ta dikehendaki mereka serta menghalangi penghidupannja.

Jang mendjadi buah mulut dinegeri itu, ta lain ta bukan "Pemerintah" s sja jang dipersalahkan berhubung oleh karena pemerintahlah harus jang bertanggung djawab dari segala-galanja apa jang tidak sesuai kemauan ra'jat. Laporan ini dibikin dengan sebenar-benarnja.

Makassar, 15 Maret 1950.-
Jang Malapurkan,

t.t.

Badang Resersir kl. II.

Terlihat oleh:

Kepala Resersir Negara Makassar
t.t. M. Kasim Dg. Fadhal.
Inspektur klas satu

Untuk salinan jang 'sana' bunjinja;
Resersir kl. II,

A. S u n u s i

- Copyan Arsip No. 170
Arsip Cabang Ujung Pandang

1999

UP

idag

H.7. 127/Rah
27/3 - 1950

Makassar, 24. Maret 1950.
No. 1045, R.N./Rahasia.
Lampiran: 1 (satu)
Pokek: Keadaan2 jang ada terdjadi di Bone.

Dengan segala hormat !

Dipersenambahkan/Disampaikan kepada P.J.M./P.T. salinan
laporan jang terlampir disini untuk disilumi.

Handwritten notes:
P. H. H. H. H.
27/3
P. H. H. H. H.
P. H. H. H. H.

A/n. Kepala Polisi Negara Makassar
Kota/Resersi Negara
Ghep Resersi Negara,

1999

Kepada

- P. Perdana Menteri N.I.T.
- di
- MAKASSAR.
- Susan dikirim kepada:
- P.M. Presiden N.I.T. Mak.
- P.M. Menteri Urusan Dalam Negeri N.I.T. Mak.
- P. Ketua Hadat Tinggi Mak.
- P. Djaksa Agung Mahkamah Djustisi N.I.T. Mak.
- P. Kepala ApJeling Mak.
- P. Wali Kota (Kepala Pemerintah Negeri) Mak.

Andi Sjamsuddin Dj. Nasallo.

UP
day

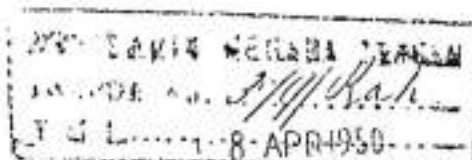
Lampiran No. 6
PEMERINTAH INDONESIA TIMUR
REGERING VAN OOST-INDONESIË

-nel-

DEPARTMENT URUSAN DALAM NEGERI
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Makassar, 6 APRIL 1950.-

No. 588/UPol/Rah.-



Lampiran:

Dijaga(n):

Pok:

Onderwerp:

Gerakan Pengotjau di Swajadaj
B o n e .-

*Ma. Hany
a. H. G.
h*

Menjundjuk laporan Resersir kelas II Resersir
Negara Makassar tertanggal 15 Maret 1950
mengenai gerakan pengotjau terdiri dari " anggota
K.N.I.L. dan anak2 Radja2 " di Bone, jang dikirim
djuga kepada Paduka Tuan Ketua Hadat Tinggi denka
surat Kepala Polisi Negara Makassar tertanggal 24
ret 1950 No. 1045/RN/Rahasia saja mohon keterangan
djelas dan pemandangan dan nasihat Paduka Tuan dis
puikan kepada saja.-

A/n.Menteri Urusan Dalam Negeri N.I.C.,
Kepala Bahagian Urusan Politik,

of. Si. K.I.S. van mil. reserach

met verwyziging naar bene staant

(G.J. Wolhoff).-

K e p a d a

Paduka Jang Malia Perdana-Menteri N.I.T.
(Bah. Komisarjat Negara Tengah)

di

M A K A S S A R .-

TEBUSAN: dikirim kepada Paduka Tuan Ketua Hadat Tinggi Daerah Seloban-Selatan
di Makassar.-

- Copyan Arsip No. 119 Arsip Cabang Ujung Pandang.

Lampiran No. 7

HADAT TINGGI

DAERAH SELEBES SELATAN

No. : 904/HT/Rahasia.-
Lampiran

MAKASSAR, 20 April 1950

Posok : Laporan tilpun dari Kepala Afdeling Bonthain.-

REKOR SARIN
KOTA BONTOL
21 APRIL 1950

r 1999

20/4/50
M. Pus
M. Pus

Dengan hormat.-

Diperma'ulkan Behadapan Paduka Jang Mulia bahwa menurut laporan dengan tilpun dari Wakil Kepala Afdeling Bonthain kepada kami maka Kota Bonthain telah dimasukki oleh satuan2 A.P.R.I.S. pada kemarin sore.

Anggota2 A.P.R.I.S. tersebut berdjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan diikuti oleh kurang lebih 200 orang pasukan liar (guerilla).

Tangsi Polisi di Bonthain diduduki oleh satuan tersebut.

Menurut chabar landjut satuan2 ini bermaksud akan meneruskan perdjalanannja djuga ke Bulukumba.-

A.n. Madjelis Harian Hadat Tinggi
Da.Erah Selebes Selatan.
Kontrolir. I jdp.,

[Signature]
M. MAJLIS HARIAN

Pada:

1. P.J. Mulia Perdana Menteri N.I.T? (Bahg. K.N.T.)
2. P.J. Mulia Menteri Urusan Dalam Negeri.
3. Paduka Tuan Djaksa Agung N.I.T.
4. Paduka Tuan Kepala Resersi Negara.

- Copyan Arsip No. 171 Arsip Cabang Pandang

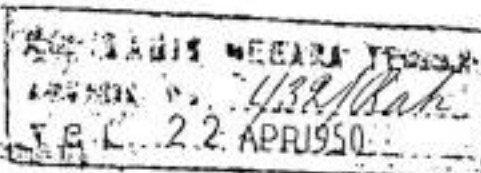
day

DAERAH SELEBES SELATAN

No. : 915/HT/Rahasia.

MAKASSAR, 22 April 1950.

Lampiran :
Polisi : Laporan2 tentang Suasana Mander dan Enrekang.-



SAMAT SEGERA

Dengan hormat

Diperma'lumkan Paduka Jang Mulia/Paduka Tuan, bahwa oleh kami diterima laporan2 jang berikut:

- I. Dari Kepala Afdeling Mander diterima kabar talipon lisan bahwa:
 - a. polisi pos di Tinambung hendak diserang oleh tentara liar jang bernama "Tengkorak Putih". Disana sekarang hanja + 20 orang polisi
 - b. Puang Limboro mendapat surat antjaman dari divisie nama "Sukuma" jang terdiri dari + 20.000 orang, dalam surat mana dikatakan bahwa mereka hendak membasmi semua orang2 federalis.
 - c. Tanggal 20 April 1950 djam 5 soreh seorang pembawa kabar di Tinambung ditembak oleh seorang nama Bara anggota Tengkorak Putih. Orang itu luka para. Pendjahat itu lari, dan ia memakai sendjata api otomatis.

Oleh itu Assisten Residen Madjene minta, supaya dengan segera dikirim bala bantuan polisi ke Madjene, sebab kekuatan polisi jang ada sekarang dalam Afdeling Mander sama sekali dianggap tidak tjukup untuk mengatasi keadaan2 disana. Diminta lebih djauh oleh Assisten Residen Mander supaya hal tersebut dibitjarakan dengan instansi Militair Apris, supaya diambil tindakan2 jang perlu untuk mentjegah bertambahnja ketitjuan di Mander.-

- II. Djam 8 malam Sabtu tanggal 21/22 April 1950 kepala Afdeling Mander lapurkan dengan lisan ditelepon sebagai berikut:

+ Kira2 3000 orang, diantarannya anggota2 Tengkorak Putih, hendak menjerang polisipos Tinambung, tetapi Maraddia jang bersangkutan berhasil memberi nasehat kepada mereka itu, sehingga mereka itu tidak djadi lakukan penjerangan, akan tetapi mereka memajukan tuntutan2 jang tersebut dibawah ini:

- a. polisipos di Tinambung ditarik ke Ibu kota Madjene.
- b. Radja2 harus berpendirian Negara kesatuan, jaitu menggabungkan diri pada Republik Indonesia.

J.M. Perdana Menteri (Bahg. K.N.T.).
J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri N.I.T.
Paduka Tuan Djsaka Agung N.I.T.
Paduka Tuan Kepala Polisi Negara Daerah Selebes Selatan
di Makassar.-

c. Maraddia

r 1999

UP

day

- c. Maraddia Depu (bekas isteri dari Maraddia Balangnipu) yang telah ditangkap dan ditahan di Makassar, dibebaskan dengan segera.
- d. H.P.B. Polewali (Tjutjo) dipindahkan dengan lekas dari Polewali.-

III. Dari Tuan Controleur Engelsman, diterima rapport Hisan:

- a. Tanggal 16 April 1950 djam 9 pagi dirampas revolver dari A.I.B. Djiamuddin dengan pengetahuan sendiri, tetapi ia takut kasih tahu siapa orang yang rampas revolver itu.
- b. Tanggal 16 April 1950 ada pertjobaan perampasan sendjata dari Aroeng Alla dan Hadji Ali di Kalosi, tetapi mereka ta'berikan sendjatanja dirampas.
- c. Aroeng Enrekang H.P.B. Enrekang minta lepas dan atas persetudjuar Hadjelis Harian Gabungan Massenrempulu diminta supaya ditempatkar kembali seorang Bestuurshoofd atau Controleur selaku H.P.B. di Enrekang.-

A.n. Ketua Hadaat Tinggi DaErah Selebes Selatan.
Wk. Sekertaris DaErah,

Kesah

ARB. KAZAK DG PATUHRI.-

- Copyan Arsip No. 120 Arsip Cabang Ujung Pandang

r 1999

UP

idag

Lampiran No. 9

M. C

15 Djuni 1950

946/upu/Rahasia

sah

Pementjabutan Radja Bone
Andi Pabbenteng s. s

Dengan hormat bersama ini adalah dikirim kepada Paduka Tuan Salinan Kawat tertanggal 10 Djuni 1950 No. B. Z. X. 8/2/33 dari Paduka jang Mulia Menteri Urusan Dalam Negeri R. I. S, dengan permintaan supaja Paduka Tuan djika boleh selekas mungkin-memberi kabar kepada saja tentang apa jang terminta dalam kawat tersebut.

A/n Menteri Urusan Dalam Negeri NIT
Sekretaris Djenderal

Abdul Razak Daeng Patunru

Kepada :

Paduka Tuan Kepala Daerah Celebes Selatan
Di-
Makassar

- Salinan Arsip No. 35 Arsip Cabang Ujung Pandang

Pengumuman No. 10
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

Mengumumkan.

Menimbang : Berdasarkan penyelidikan yang obyektif terhadap beberapa orang pemangku jabatan dalam daerah2 Swapradja, maka pemerintah daerah Sulawesi Selatan berpendapat dan yakin ta' mengingini lagi pemangku2 jabatan itu tetap ada dalam djabatannya.

Menentukan : memejat

- I. a) Andi Pabbenteng, sebagai Kepala Swapradja Bone dengan bergelar Arumpono.
 - b) Andi Tjalo, sebagai Kepala Swapradja Mlusetasi dengan bergelar dengan bergelar Arum Malusetasi.
 - c) Andi Tjalo, sebagai anggota Hadat Swapradja Sawitto dengan bergelar Sulewatang.
 - d) Andi Tante, sebagai Kepala Swapradja Suppa dengan bergelar Datu Suppa.
 - e) Andi Nemba, sebagai anggota Hadat Swapradja Suppa dengan bergelar Sulewatang.
 - f) Hamsah Daeng Tompo, sebagai anggota Hadat Swapradja Goa dengan bergelar Pajallo.
- II. Pemejatan ini dianggap mulai berlaku tanggal 1 Juni 1950.
- III. Surat2 pengesahan menjusul.

Makassar, 8 Djuni 1950

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
Kepala Bahagian Pemerintah.

I. A. Saleh Daeng Tompo

Salinan
Penulis

- Salinan Arsip No. 35
Arsip Cabang Ujung Pandang

DAFTAR INFORMAN



Nama : Andi Muhammad Ali
Umur : 73 tahun/1927
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri (Dikbud)
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 20 Watampone

nr 1999

Nama : Andi Mappasissi
Umur : 78 tahun/1922
Pekerjaan : Kepala Mesium La Pawawoi
Alamat : Komp. Mesium La Pawawoi

Nama : Andi Ode Kaimuddin
Umur : 61 tahun/1939
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Alamat : Jl. Makmur No. 12 Watampone

UP

udny

1.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA
KAMPUS TAMALANREA UJUNG PANDANG

Nomor : 5370 / J04.10.3/KM.12/19..
Lamp. : --
Hal : Permohonan izin penelitian

2 Nopember 1999

Yth. Bapak/Ibu Kepala Arsip Nasional Cabang
Makassar
Di-
Makassar

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Sastra Unhas yang tersebut di bawah ini:

Nama : Mappayukti.

No. Pokok : 94 07 013

Jurusan : Sejarah

dinencanakan akan melaksanakan penelitian pendahuluan di
Arsip Nasional Cabang Makassar
dengan judul : ANDI PABBERPENG (Analisis Ideologi dan Politik tahun
1945 - 1951)

Sehubungan dengan hal itu kami mohon kiranya Bapak berkenan
memberikan izin terhadap mahasiswa yang bersangkutan untuk
melakukan penelitian sesuai dengan judul yang dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima
kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan III,



Tembusan :

1. Pembantu Rektor III
2. Dekan Fakultas Sastra
3. Pembantu Dekan I Fakultas Sastra Unhas
4. Ketua Jurusan yang bersangkutan
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Bertinggal

Mohammad Bahar Akkase Teng. LCP. <
NID. 31866384

ar 1999

uday

4.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

1999

Nomor : 070/29.20 -III /DSP 99.
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Ujung Pandang, 14 Oktober 1999.

Kepada

Yth. BUPATI KIH TK II BOLA
Up. KEPALA KANTOR SOSPOL ✓

Di - WATAMOLE.

Berdasarkan Surat Pembantu Dekan III Fak. Sast_{ra} UNHAS Ujungpandang No. 4543/504.
10.3/KM.11/1999 tanggal 5 Agustus 1999,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MAPPANYUKKI
Tempat/Tanggal lahir : Ta' (Bone), tahun 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Sast_{ra} UNHAS UP.
Alamat : Perum. Dosen AG/27 Tamalanrea UP.
Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"ANDI PABBEWENG" (Analisis Ideologi dan Politik tahun 1946 - 1950)
Selama : 3 (tiga) bulan tmt. 15 Nov. s/d 20 Feb. 2000
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDH TK. II Up. Kakan Sospol. apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan

uday

A.

3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan Up. Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

er 1999

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Tembusan :

1. Dirjen Sospol Depdagri di Jkt.
2. Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Sbg. lap)
3. Ketua Bakorstanasda Sulawesi
4. Kapolda Sulsel
5. Residen Pemb. Gu. Wil. V di W. Pone.
6. Dekan Fak. Sastra UNHAS UP.
7. Sdr. Mappanyukki.
8. A r s i p.
- 9.
- 10.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
KEPALA SUBDIT KEPENTRAN UDITK
Drs. AMI RUDDIK YUNUS
Pangkat : Pembina
N i p : 010 082 915.

UP
uday
4.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Ujung Pandang 90245
Telp. 510257, 512079, 512081, 512082, 512083, 512084, 512085, 512087, 512089, 512090, 512091, Fax. 513995

Nomor : 463/106.13/1999
Hal : Izin Melakukan Penelitian

Yth. 1. Kabid Jawa Timur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kakanwil Depdikbud Kabupaten Bone di Watampone

Des 1999

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Sastra UMSA tanggal 5 September 1999 Nomor 4543/199.12.3/04.11/1999

Hal surat di atas, dengan ini kepada Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mappanyoddi
STB/NIRM : 2437013
Jurusan : Sastra
Program : Strata Satu (S1)


Diizinkan mengadakan penelitian pada Kabid Jawa Timur Kanwil Depdikbud Prop. Sul_Sel dan Kander Depdikbud Kabupaten Bone.

Untuk memperoleh Data dalam rangka Penyusunan Skripsi/Tesis yang bersangkutan dengan judul : " ANDI PAIBENTING "

(Analisis Ideologi dan Politik tahun 1945 - 1951)

Kepada Mahasiswa yang bersangkutan, sebelum melakukan Penelitian agar lebih dahulu menghubungi Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk pengaturan waktunya sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Demikian Izin ini, diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


a.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi
u.b. Kepala Bagian Tata Usaha
Drs. H. Hanafi Mappasomba
NIP 130457827

Tembusan :
1. Kakanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel
(sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Sastra UMSA
Ujung Pandang
3. Kabag. Koordinasi Kanwil Depdikbud
Prop. Sul-Sel di Ujung Pandang
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

a. UP
an-
4 -
buday
BA.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PRŌPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR KABUPATEN BONE
ALAMAT C JL.DR.W. SUDIRO HUSODO TELP.24041 WATAMPONE

SEKSI KEBUDAYAAN

N o m o r : 05 /106.7/11/1999
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Watampone, 23 Desember 1999

K e p a d a

Yth. : 1. ANDI RASO AHMAD
2. DRB. AMIR SESU

di

T e m p a t

Dengan hormat, sehubungan dengan maksud peralitian okum tersebut -
dibawah ini :

N a m a : KAPTANYUKKI
Tempat/tagl lahir : Bone, 31 Desember 1973 .
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Inspektur Utama
A l a m a t : Fort. Joesan AG/27 Tapulrya, UP

Dimohon kesediaan Bapak kiranya berkenan memberikan keterangan/bahan-
yang diperlukan dalam rangka pengusunan skripsi dengan judul :

. ANDI PANDEPANG (. Analisis Jeologi dan Geologi tahun 1945 - 1954)
.....

Atas bantuan dan kerja samanya, diucapkan banyak terima kasih.

An. Kepala
Kepala Seksi Kebudayaan
ANDI SINAR, AL. RA.
NIP. 130355852.-